PELAKSANAAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

NURHALIMAH

NPM : 171010028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada dasarnya sama dengan pelaksanaan isbat nikah lainnya dilihat dari : Pendaftaran Perkara, Pembayaran Biaya perkara, Panitera, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Pengambilan Produk Pengadilan. Kendala dalam proses Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru di pengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari pihak yang mengajukan Nikah Sirri, Hakim Pengadilan Agama.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa kendala dalam proses Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau Observasi (observation research), yang bersifat Deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, kuisioner dan observation yang berkenaan dengan Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

Pelaksanaan Permohonan isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru banyak dikabulkan karena pernikahan sirri dilakukan oleh para pihak yang mengajukan Permohonan Isbat Nikah Sirri telah dilakukan sesuai Syari'at Islam. Kemudian para pihak yang melakukan pernikahan sirri juga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, dan Kemaslahatan yang ditimbulkan akibat dikabulkannya suatu permohonan Isbat Nikah Sirri lebih besar disbanding Isbat Nikah Sirrinya ditolak, tidak diterima (NO), dicabut atau digugurkan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

The implementation of the IsbatNikahSirri at the Pekanbaru Religious Court is basically the same as the implementation of the Isbat Marriage in other respects: Case Registration, Payment of Court Fees, Registrar, Head of Religious Court, Panel of Judges, Court Product Collection Constraints in the application process for the IsbatNikahSirri at the Pekanbaru Religious Court were influenced by several factors originating from the party who proposed the Sirri Marriage, the Judge of the Religious Court.

The main problem in this research is how to implement an application for sirri marriage isbat at the Pekanbaru Religious Court based on Law Number 1 of 1974 and what are the obstacles in the process of applying for a sirri marriage isbat at the Pekanbaru religious court.

This study uses the Sociological Legal Research Method or Observation (observation research), which is descriptive analytical, while the data collection tools in this study are through interviews, questionnaires and observations relating to the Implementation of the Application for Isbat Marriage Sirri at the Pekanbaru Religious Court Class 1 A.

The implementation of the Sirri Marriage Isbat Application at the Pekanbaru Religious Court was widely accepted because the sirri marriage was carried out by the parties who submitted the Sirri Marriage Isbat Application which had been carried out according to Islamic Shari'ah. Then the parties who carry out a sirri marriage are also not married to other people, and the benefits resulting from the granting of a Sirri Marriage Isbat application are greater than the Sirri Marriage Isbat rejected, not accepted (NO), revoked or aborted.

Keywords: *Implementation of the Application for Isbat Marriage Sirri at the Pekanbaru Religious Court Based on Law Number 1 of 1974.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayah Pandapotan Sihaloho dan Ibu Restinawati Panjaitan tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril dan materil kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang takakan pernah mampu penulis membalasnya.

Dan untuk saudara kandung penulis, Abang Imran Sihaloho, Kakak Eka Padmasari Panjaitan, Kakak Vika Safitri Sihaloho, Adik PutriAliah Sihaloho yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Kehadiran Allah SWT, Tuhan Smesta Alam yang selalu memberikan Perlindungan dan pertolongan dalam menunjukkan jalan kemudahan serta telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadila Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan xii kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas HukumUniversitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas HukumUniversitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas HukumUniversitas Islam Riau.
7. Ibu Sri Arlina, S.H., M.H. Selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibuk dapat dibalas oleh Allah Swt.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak/Ibu Karyawan/ di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepala Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yang telah memberikan izin pada penulis untuk dapat diperbolehkan mengadakan penelitian dan memberikan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis guna kelengkapan untuk penulisan skripsi ini,
11. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2017,
12. Terimakasih kepada DhaniBerutu, Bude Suci, Nurfadilah S.IP, Natasya Kiki Meriska S.IP, Rani Puji Astuti S.IP, Yuni Hartati S.IP, Putri Delima S.H, Mariatun S.AB, Meldiana Hendra Savitri, Utari Wijiyanti, Risa Leila, Evi Rosnauli Berutu, Alnoviantika, ViraWahyuni, Violitasari, Nining Setianingsih, Bambang Sumantri, M.Rafli, Terimakasih sudah member dukungan dan nasehat, saling mengingatkan penulis, berbagai canda tawa selama dikampus maupun diluar kampus.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis xiv menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebihbaik.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, Penulis mendoakan semoga *Allah SubhanahuwaTa'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya,

Aamiinyarabbal'alamin.

Pekanbaru, 18 Juni2021

Penulis

NURHALIMAH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ..... **iii**
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING ..... **vi**
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI ..... **vii**
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSHIP ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. RumusanMasalah 9
C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian 10
D. TinjauanPustaka 10
E. KonsepOprasional 21
F. MetodePenelitian 22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. PerkawinandanNikahSirriPadaUmumnya 27
   a) PengertianNikahSirri 27
   b) FaktorTerjadinyaNikahSirri 34
   c) DampakNikahSirri 35
B. KetentuanTentangHukumIsbatNikah 37
   a) PengertianDasarHukumIsbatNikah 37
   b) ManfaatIsbatNikah 42
C. TinjauanUmumMengenaiPengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 43
   a) Letak Kota 43
   b) SejarahSingkatPengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 44
   c) VisidanMisiPengadilan Agama Kelas 1 A Pekanabru 46
   d) StrukturOrganisasiPengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL PENELITIAN

A. PelaksanaanIsbatNikahSirri Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 53
B. FaktorKendala Proses PermohonanisbatNikahSirriIsbatNikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.....61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....80
B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....83

LAMPIRAN.....87

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bertujuan untuk menjaga harga diri atau bisa disebut (hafizh al-'irdh) Agar tidak terjerumus ke dalam perilaku terlarang untuk menjaga kelangsungan hidup manusia atau generasi yang akan datang (hafiz an-nasl) Membangun kehidupan keluarga yang sehat penuh cinta kasih antara suami istri, dan saling membantu diantara keduanya, sehat untuk kepentingan dunia dan masa depan.[1]

Perkawinan mengandung tiga nilai yaitu:

1. Nilai Religi "Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Nilai Sakral "Ikatan Lahir Batin"
3. Nilai Magis "Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal"[2]

Melihat tiga nilai perkawinan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tujuan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga sejahtera, bahagia dan abadi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.Tidak mudah untuk mencapai segalanya, karena perwujudan pernikahan tidak hanya diukur dari nilai material dan ciri material, tetapi juga untuk mencapai ketiga nilai tersebut. mencapai.[3]

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam yang telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.Mengatakan bahwa Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari Hukum Muammar, itu adalah kontrak yang sangat kuat atau

[1] Nurhadi, *Pernikahan dan Perkawinan*, 2018, Cetakan Ke 2
[2] Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm, 25
[3] Ibid, hlm, 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mutsaaqon qholudhan.Menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah.Karena mengatur hubungan antar manusia.Hukum tentang pernikahan, rekonsiliasi, dan masalah kehidupan keluarga lainnya.[4]

Dari pengertian lain, kita dapat melihat bahwa pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan naluriah hidup manusia,Hubungan antaraseorang laki-laki dan perempuan adalah membangun keluarga bahagia dengan melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.[5] Tujuan perkawinan itu sendiri disimpulkan:

(Surat Az-Zariyat Ayat 49) :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَىْءٍ كُلِّ وَمِن

Artinya: "Dan segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan, dari sepasang suami Istri kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami istri".[6]

(Surat Ar-Rum Ayat 21) :

مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓا أَزْوَٰجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ ءَايَٰتِهِۦٓ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَءَايَٰتٍ ذَٰلِكَ فِى إِنَّ ۚ وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[7]

Isbat nikah sirri adalah suatu proses penetapan yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru oleh dua orang pasangan suami istri,Menikah tapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).Tujuan dari isbat nikah sirri

[4] Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 104
[5] Basyir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm, 11
[6] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Penerbit Rineka, Jakarta, 1996, hlm, 82
[7] Ibid,hlm 83

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah untuk memperoleh akta nikah agar pernikahan sirri tersebut mempunyai bukti dan kepastian serta kekuatan hukum.[8]

Permerintah Indonesia mengeluarkan Dasar Hukum Terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu dalam pasal. "Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai berikut:Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"dalam hal ini bisa diartikan sudah memenuhi syarat rukun nikah seperti nikah, atau ijab kabul sudah dilaksanakan (bagi muslim). Pendeta atau pendeta sudah berbicara, sehingga pernikahan bisa dikatakan efektif, terutama dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat.[9]

Menurut hukum agama Islam, jika suatu perbuatan hukum memenuhi dua unsur berikut, maka dapat dikatakan legal dengan unsur yaitu: Syarat dan Rukun, Syarat merupakan sesuatu yang termasuk dalam setiapUnsur tindakan hukum. Rukun merupakan unsur yang tidak lepas dari perbuatan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan, rukun berasal dari bahasa Arab *rakana, yarkumu, ruknan, rukman,* Artinya: Tiang, sandaran atau unsur.[10]

Dalam menentukan keabsahan akad nikah Islami ada tiga syarat yaitu:

1. Terpenuhinya semua syarat-syarat nikah
2. Terpenuhinnya rukun-rukun nikah

[8] Dian Syafrianto, *Nikah Sirri*, Pustaka Setia, Semarang, 2013, hlm, 3
[9] Ibid, hlm, 4
[10] Dahlan, *Hukum Agama Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm, 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tidak ada melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dengan syari'at.[11]

Mengenai keabsahan suatu perkawinan, Dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat perlu diakui oleh negara.Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti nyata agar timbul masalah pada tahapan perkawinan selanjutnya. Misalnya, jika terjadi perceraian, akta nikah akan digunakan sebagai alat bukti dan alat untuk menyelesaikan masalah.[12]

Jika perkawinan tidak didaftarkan maka akan berdampak burukbagi perempuan dan anak yang tidak menikah membawa akibat hukum.[13]

1. Bagi istri, perkawinan siri biasanya berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan, karena jika perkawinan tidak dicatatkan maka isteri akan dianggap sebagai istri tidak sah karena tidak memiliki bukti kawin, dan tidak mempunyai hak apapun terhadap harta warisan dan pemberian nafkah dari suami apabila ia meninggal dunia, dan juga tidak mempunyai hak apapun terhadap harta bersama apabila terjadi perpisahan dikemudian hari, karna perkawinan yang dilakukan sebelumnya secara hukum dianggap tidak pernah ada.

Dilihat dari akibat hukum dari perkawinan yang tidak disebutkan di atas, maka nampak jelas bahwa dampak kerugian tersebut berdampak pada istri, Makna nikah tidak dicatat di sini, yaitu perkawinan berdasarkan syarat dan ketentuan

[11] Ibrahim, *Hukum Pernikahan Agama Islam*, Bandung, 2013, hlm, 5
[12] *https:ojs.unud.ac.id./index.php/7523 Pengertian Perkawinan,/diakses tanggal 7 Oktober 2020*
[13] Dian Syafrianto, Op.cit, hlm, 27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan Islam, namun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Pengertian dari perkawinan tidak dicatatkan pada awalnya perkawinan yang tidak dicatat itu adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun tidak dicatat di KUA.Saat ini definisi perkawinan sirri telah diperluas dengan mencakup perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).[14]

Oleh sebab itu perkawinan dilakukan secara sirri atau pun tidak dicatatkan tidak mempunyai hukum kekuatan hukum apapun, dan jika suatu saat nanti mereka mengalami masalah yang terkait dengan rumah tangganya, maka pihak KUA dan Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan dan menerima pengaduan dari para pihak yang melakukan pernikahan sirri tersebut.[15]

Dalam hukum positif tidak ada pembahasan nikah sirri, apalagi mengatur mengenai perkawinan sirri di peraturan perundang-undangan. Nikah Sirri itu tidak termasuk tradisi bagi umat Islam karna sudah jelas bahwa, rasullullah SAW berpesan agar kita mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas Kata sirri berasal dari kata sarra, yasirru, sirrsn, sir, artinya rahasia atau rahasia.

Seperti apapun nikah sirri tersebut apabila pernikahannya itu telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam namun tidak dicatatkan di KUA, maka perkawinan tersebut akan dianggap tetap tidak legal. Perkawinan dapat dinyatakan sah oleh Negara apabila ia telah didaftarkan dan dicatatkan oleh KUA, bagi yang

[14] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 214.
[15] Nasirri, *Praktik Prostusi Gigolo Ala Yusuf Al-Quran "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin"* Surabaya, Khalista, 2010, hlm, 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beragama Islam. Bagi masyarakat Islam di Indonesia perkawinan dilakukan secara sirri itu pada umumnya tidak hanya pada perkawinan yang pertama saja, namun juga perkawinan untuk yang kedua, atau bahkan ketiga kalau dengan menceraikan kedua kalinya dan kemudian yang memotivasinya banyak untuk dilakukan yaitu untuk mendapat kenikmatan seksual semata.[16]

Secara garis besar, nikah sirri itu sama halnya dengan memberikan terjadinya hidup bersama padahal mereka tidak mempunyai bukti apapun yang menyatakan bahwa mereka sudah menikah dan ini snagat merugikan bagi pihak yang melakukan nikah sirri tersebut terutama bagi perempuan apa lagi bagi mereka yang sudah mempunyai anak,Anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah, dan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, dengan kata lain anak dianggap tidak memiliki ayah. Tidak ada hak untuk memaksa pencatatan perkawinan, namun jika perkawinan tidak dicatat maka akan berdampak negatif atau berakibat hukum yang sangat besar terutama bagi perempuan dan anak.[17]

Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru 2020 adalah sebagai berikut:

[16] Ibid, hlm, 46

[17] Dian Syafrianto, Op,cit, hlm 47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1

Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

NO	Tahun	Jumlah perkara	Dikabulkan	Ditolak	Digugurkan	Tidak diterima (NO)	Dicoret	Dicabut
1	2020	50	30	-	-	2	4	8

Sumber Data: Pengadilan Agama Pekanbaru 2020

Garis besar yang dapat diambil dari data tersebut adalah bahwa permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru masih sangat besar, yaitu sebanyak 50 permohonan nikah pada tahun 2020. Dari 50 perkara tersebut, 30 perkara disetujui sedangkan sisanya 2 perkara tidak.dari 4 kasus, dan dari 8 kasus. Tidak ada kasus yang ditolak atau ditutup.Dari data tersebut dapat dipahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, permohonan Isbat Nikah Pengadilan Agama Pekanbaru masih menghambat perkawinan.Bukti menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 2 perkara akan ditolak (Tidak) dan 4 perkara akan ditolak. Pencabutan dan 8 kasus dicabut. Kemudian menurut UU Perkawinan, dari 30 kasus Isbat Nikah yang disetujui, masih terdapat dua kendala dalam menikah karena salah satunya masih di bawah usia minimum untuk menikah.

Pernikahan Siri karena salah satu calon mempelai menikah dengan orang lain yang terjadi pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, Isbat Nikah Sirri mengajukan petisi dimana pemohon I (laki-laki) dan pmohon II (perempuan) ditulis sebagai laki-laki dan perempuan sebelum menikah, namun dalam persidangan, Pemohon II membeberkan Statusnya bukan perempuan, tapi janda, tapi tidak ada bukti perceraian. Bersama suami pertama, ia kemudian mencabut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permohonan nikah isbatnya atas usul majelis hakim. Apabila Pemohon tidak mencabut perkara, maka majelis hakim akan menolak permohonan nikah isbatnya karena perkawinannya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 9.

Berbeda dengan situasi lain, alasan perkawinan di Siri adalah karena calon pengantin masih di bawah batas usia minimum untuk menikah. Kalaupun bertentangan dengan Pasal 7 (1), laki-laki yang diizinkan menikah berdasarkan Pengadilan Agama Pekanbaru biasanya berusia 19 tahun.Wanita berusia 16 tahun. Hukum Islam.

Seperti pada Yurisprudensi Mengenai Isbat Nikah Sirri, misalnya dalam perkara Pengadilan Agama Malang, saat pemohon menikah dan sedang dalam putusan (Nomor 7 / Pdt.P / 2017 / PA.Pal dan Putusan Nomor 7 / Pdt.P / 2017) / PA. Sobat) telah memenuhi syarat nikah dan kerukunan, serta mematuhi hukum Islam yaitu ketentuan Pasal 14 KHI yaitu adanya calon mempelai, saksi nikah dan surat persetujuan, Kabul dan pasal 2 sd 7 undang-undang Pasal 1/74.[18]

Kemudian tidak ada syarat untuk menikah, baik pelamar pertama maupun kedua tidak ada sangkut pautnya dengan perkawinan lain.Hal ini senada dengan Pasal 40 KHI, karena karena masalah administrasi dan kelalaian tenaga administrasi, maka perkawinan kedua mereka tidak memiliki buku nikah. Dan dicatat ke PPN (Panitera Nikah), dalam hal ini merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 6

[18] Imam Ahmad, *Hukum Pernikahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KHI, nikah harus membayar PPN untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan nikah.

Dari perkara-perkara di atas terlihat bahwa putusan pengadilan No. 0262 / Pdt.P / 2017 / PA.Mna dan No. 7 / Pdt.P / 2017 / PA.kedua putusan ini disetujui hakim karena tidak ada satupun yang melanggar hukum. Dari segi sosial, perlu dipastikan bahwa pasangan suami istri mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah dalam kehidupan moral dan hukum bersama, termasuk masalah perkawinan dan masalah harta benda karena kepentingan perempuan.Serta masalah perkawinan yang terkait dengan kewajiban, suami dan istri di bawah UUP dan KHI.Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis merasa tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Isbat Nikah Sirri yang dikabulkan dengan judul"Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangyang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan Masalah hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Apa kendala dalam proses Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru

b. Untuk mengetahui Kendala Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru banyak dikabulkan

2. Manfaat Penelitian

a. Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dalam teori dan praktek serta menambah wawasan penulis khususnya ilmu tentang Isbat Nikah Sirri.

b. Sebagai referensi tambahan bagi perpustakaan Universitas Islam Riau, hendaknya dapat menjadi referensi bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Agar pembahasan dalam penelitian ini sejelas dan bermakna sesuai harapan, maka penulis memberikan batasan penelitian tentang makna dan tujuan judul penelitian, sebagai berikut:

a. Perkawinan

Pernikahan yaitu hubungan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan.“Itulah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerohanian dan agama."Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sangat erat hubungannya dengan agama.Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memiliki faktor materi / fisik saja, tetapi juga memiliki faktor spiritual / spiritual yang juga berperan penting.Untuk membentuk keluarga bahagia dengan keturunan adalah tujuan pernikahan, pengasuhan dan pendidikan adalah hak dan kewajiban orang tua.[19]

Sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dalam bentuk (bentuk) tersendiri yang diketahui atau berlaku umum dalam hukum.
b. Sumber hukum materil adalah sumber isi (materi) yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghasilkan hukum itu sendiri.[20]

Dari penjelasan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan sosial, Pasal 1 menjelaskan: "Perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perkawinan yang berkaitan dengan keyakinan. Apabila melihat tafsiran dari hazarin mengenai pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dapat ditafsirkan sebagai berikut:

[19] Djubaidah, *Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta, 2012,hlm, 107.
[20] Fitriarus, *hukum Perkawinan*, UIR Prees, Pekanbaru, 2017, hlm, 25.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Di Indonesia sendiri sangat dilarang adanya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing masyarakat.
2. Negara wajib menjalankan segala peraturan perkawinan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat, karna untuk sekedar menjalankan hukum perkawinan telah membutuhkan negara yang menjadi perantaraan bagi masyarkat.

Berbicara mengenai Undang-Undang perkawinan itu dapat Universal maupun Deferensial, karna untuk menentukan sahnya perkawinan itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama yang dianut oleh masyarkat, perkawinan yang dimaksud disini yaitu suatu peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum tidak dapat berlaku tanpa adanya peristiwa penting seperti yang telah diatur pada pasal 2 ayat (2), bahwa setiap perkawinan haruslah dicatatkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan sama halnya dengan menikah menurut ajaran hukum Islam,dimana diadakannya suatu akad yang sangat kuat atau pun *"mitsaaqhon gholidhan"* untuk menaati perintah Allah SWT dan apabila melaksanakannya merupakan suatu ibadah, dan adanya perkawinan itu untuk tercapainya tujuan agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[21]

Islam menentukan keabsahan akad nikah dengan tiga syarat:

1. Dipenuhinnya semua rukun nikah

[21] Djubaidah, P*erkawinan dan Pernikahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 212-213

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada.[22]

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi dan
e. Ijab dan Kabul

Dalam melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi rukun nikah seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan harus ada. Kewajiban adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya akad nikah yang merupakan ijab dan Kabul yang dilakukan antara wali pihak mempelai perempuan, dengan mempelai laki-laki dan hakikat perkawinan sendiri rukun nikah itu termasuk didalamnya maksudnya jika salah satu rukun nikah tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.[23]

Dalam perkawinan menurut mazhab dari Syafi'i dan Maliki seorang wali dalam suatu pernikahan itu sangatlah penting karna menurut mazhab tersebut tidak pernah ada pernikahan tanpa adanya seorang wali namun sangat jauh berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Hanafi dan Hambali dimana mereka mengatakan juka pernikahan yang dilakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tetap sah. Pemahaman ini juga dianut oleh sarjana yang ada di Indonesia seperti Hazairin dan Sayuti Thalib, dimana Sayuti Thalib mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanafiah dan Hazairin yang mengatakan dari segi pandangan hukumnya bagi perempuan yang sudah dewasa wali bukanlah menjadi

[22] Zein, *Kompilasi Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 33
[23] Admiral, Op.cit, hlm, 16

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu syarat yang harus di penuhi, tetapi alangkah baiknya jika wanita melaksanakan pernikahan itu wali dalam pelaksanaan ijab kabulnya.

Hadits Aisyah menurut kitab-kitab keimanan ahmad, al-irmidzi dan lain-lain menjelaskan bahwa Rasul berkata seorang wanita yang ingin menilkah, jika tidak seizing walinya maka nikahnya akan dianulir, namun dalam Hadits ini juga jelas dinyatakan demikian. Perselisihan antara wali keluarga dengan perempuan, pejabat, pemerintah yang dirunjuk sebagai wali.Izin dari keluarga wali sebagai hal tertentu dapat diganti dengan izin dari wali non keluarga yaitu wali pemerintah di Indonesia. Hal ini diatur oleh pengadilan agama atau oleh orang lain yang baik. Hal inilah yang dialami bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.[24]

Dalam pernikahan yang menjadi wali adalah laki-laki menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal yang dapat menjadi wali itu adalah wali nasab yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki dari ayah dan lain-lain. Wali nasab dapat dikatakan wali *mujbir* dimana ia mempunyai hak untuk memaksa menentukan dengan siapa perempuan itu harus menikah. *Mujbir* artinya: orang yang memaksa seperti ayah, kakek dan seterusnya keatas. Kemudian ada juga wali nasab yang tidak mempunyai hak untuk menuntut seorang perempuan untuk menikah dengan pilihannya seperti saudara laki-laki kandung. Kemudian yang dapat menjadi wali adalah wali hakim yaitu seorang penguasa yang memiliki wewenang dalam bidang pernikahan seperti penghulu, tetapi wali hakim ini baru diijinkan wali nasab jika wali nasab mempunyai halangan untuk hadir dalam pernikahan hakim

[24] Imam Ahmad, *Hukum Pernikahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga bisa karna ia memiliki pengertian keagamaan yang bisa bertindak menjadi seorang wali.[25]

Mengenai saksi sendiri didalam pernikahan sebagian ulama ada yang mengatakan sebagai rukun nikah, seperti pendapat dari Syafi'I, Hanafi, dan Hambali, apabila pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka pernikahan tersebut akan menjadi tidak sah pada dasarnya sudah dijelaskan dalam hadist nabi yang mengatakan bahwa "tidak sah suatu pernikahan melainkan dengan dua wali, dua orang saksi yang adil" dan yang menjadi saksi itu haruslah seorang muslim.

1. Dipenuhinnya syarat-syarat nikah

Jika membahas mengenai syarat dalam pernikahan tentu ia ada sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa hukum. Ada beberpa syarat dalam pernikahan bagi mempelai laki-laki dan perempuan, yaitu bagi mempelai laki-laki ia haruslah beragama islam begitu juga dengan mempelai perempuannya, jelas bahwa mempelai laki-laki adalah seorang laki-laki begitu juga dengan perempuannya jelas bahwa dia adalah seorang perempuan, tidak ada paksaan dalam melakukan pernikahan, bagi mempelai perempuan telah memberikan izin kepada walinya untuk menikahkan,bagi mempelai laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat dan bagi perempuan tidak boleh yang masih bersuami dan masih dalam masa iddah,. Orang yang dinikahi bukan mahramnya orang yang dinikahi sudah jelas, dan tidak sedang dalam ihram atau umrah.[26]

[25] Ibid, hlm, 26
[26] Ibid,hlm, 19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tidak melakukan pelanggaran dalam larangan perkawinan seperti yang sudah di tentukan dalam syari'at

Larangan nikah sirridiatur secara tegas didalam AL-Qur'an dan juga dalam hadist yang memuat larangan melangsungkan pernikahan jika ada hubungan darah diantara kedua calon mempelai, karna ada hubungan susuan, karna adanya hubungan semenda, larangan menikah kembali dengan mantan istri yang telah ditalak tiga kecuali istri tersebut menikah lagi dengan orang lain yang kemudian bercerai dengan suami terakhir, dilarangnya seorang laki-laki memperistrikan dua orang perempuan yang bersaudara, larangan untuk laki-laki menikah lebih dari empat istri, dan melarang laki-laki menikahi perempuan yang masih memiliki suami (Poliandri).[27]

Terdapat dua peraturan dalam membagi ketentuan yang mengatur tentang pernikahan menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Ha. Pertama, menurut Syara' yaitu suatu peraturan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, peraturan ini ditetapkan oleh Syari'at Islam, kedua, suatu peraturan yang memiliki sifat tawsiqy yaitu suatu tambahan dalam peraturan yang dimaksudkan agar tidak terjadi pernikahan secara liar, dengan kata lain pernikahan yang dilaksanakan itu tercatat secara resmi, gunanya agar ada perlindungan terhadap pernikahan mereka.

Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tentang perkawinan menjelaskan perkawinan adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan peristiwa hukum. Apabila melihat fungsinya serta kedudukan pencatatan

[27] Ibid, hlm, 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan ini dapat menjamin tertibnya hukum, dimana perkawianan tersebut mempunyai suatu kepastian kemudian dapat menjadi alat bukti dimana ia benar sudah menikah dan akan mendapatkan kemudahan dalam hal administratif ini menurut pendapat dari Bgair Manan.[28]

Jika dilihat dari hubungan hukumnya pencatatan perkawinan sendiri akan menjadi suatu upaya dalam meningkatkan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam juga terwujud. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah.Sehingga dengan demikian didalam Undang-Undang perkawinan mengharuskan adanya pencatatan dalam suatu pernikahan walaupun tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa pencatatan itu menjadi syarat sah suatu pernikahan.[29]

Mengenai pencatatan perkawinan status hukumnya itu merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk kepada syarat sah dalam perkawinan menurut agama. Tetapi, pencatatan perkawinan itu menjadi sangat penting walaupun hanya sekedar peraturan administratif yang harus di penuhi oleh masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan mereka tidak dicatatkan akan mengakibatkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

[28] Djubaidah, Op.cit 215
[29]Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks ke Inodesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm, 96-97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan pernikahan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya, ini juga dapat disebut sebagai pernikahan yang dilakukan secara sirri, karna peraturan yang sudah ada tidak berjalan secara efektif didalam masyarakat.Awalnya nikah sirri ini dimaksudkan kepada pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun didalam pernikahan, tetapi saat ini sirri termasuk juga kedalam pernikahan yang belum/tidak dicacatkan di KUA, karna pengertian nikah sirri sudah di perluas. Berdasarkan pertimbangan yang di pakai dalam pandangan hukum Islam ialah selama pernikahan yang dilakukan itu tidak mengandung unsur mudharat maka tidak akan menjadi sunah masalah. Tetapi berbeda dengan nikah sirri karna ada beberapa akibat yang akan dialami oleh para pihak yang melakukan pernikahan sirri tesebut, dan jelas akibat yang ditimbulkan itu bersifat negatif, yang pasti akan merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut, terhadap perempuan akan mengakibatkan tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum, karna ia tidak mempunyai bukti secara autentik, dan konsekuensi yang didapat adalah ia tidak akan mendapatkan harta bersama, karna memang pernikahan tersebut tidak pernah dianggap terjadi, selain itu, nikah sirri juga menyimpan akibat sosial yang tidak kecil,yaitu: perempuan simpanan para lelaki hidung belang.[30]

Selain itu, nikah sirri juga akan mengakibatkan status anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas, walaupun anak mereka itu menurut agama adalah anak yang sah, tapi karna pernikahan orang tua nya dulu tidak dapat dibuktikan maka anak

[30] Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 190

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran. Anak bisa mendapatkan akta jika ia disebut sebagai anak luar nikah. Mengenai anak yang lahir diluar nikah ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayahnya bahkan tidak juga berhak atas harta ayahnya.Apabila ternyata masyarakat tidak memperhatikan pendaftaran maka akan menimbulkan konsekuensi negatif lainnya yaitu semakin banyaknya poligami di masyarakat.[31]

Di antara peraturan tentang perkawinan umat Islam Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pencatatan nikah agar perkawinan dapat mendapatkan akta nikah resmi kemudian adaketentuan Isbat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dimana pada ayat 2 dijelaskan "bagi mereka yang bisa mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama" dan untuk mengajukan Isbat Nikah terdapat hal-hal tertentu yang bisa dijadikan alasan pengabulan dari isbat nikah, seperti yang dijelaskan di pasal 7 ayat 3 KHI yaitu:

"terjadi perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, terjadinya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, kemudian tidak memiliki halangan apapun terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pengajuan permohonan Isbat Nikah itu dilakukan oleh suami atau pun istri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingngan dengan perkawinan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di pasal 7 KHI ayat (4) diadakannya peraturan tersebut memberikan

[31] Ibid, hlm, hlm, 191

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

isyarat bahwa di Indonesia mengakui keabsahan dari nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan yang kemudian dengan berbagai alasan yang telah disebutkan pada pasal tersebut, nikah sirri itu dapat di Isbatkan dan dicatat perkawinannya sehingga negara mengakui bahwa pernikahan yang mereka lakukan bener-bener terjadi.[32]

Untuk mengetahui serta memperjelas isi dari penelitian ini, yang mana mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penting dipaparkan hasil penelitiannya untuk dikaji secara seksama, dimana penelitiannya berkaitan dengan tema Isbat Nikah Sirri sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh dian Syafrianto yang membahas Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang, dan tata cara pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Mukhtaruddin Bahrum yaitu: Fokusnya adalah bagaimana melegalkan perkawinan sirri melalui Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum setelah menikah dan setelah disahkan undang-undang perkawinan untuk kepentingan keluarga.

[32] Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020,hlm, 37

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari kedua penelitian ini sama, namun berbeda dalam asas dan pembahasan pernikahan Siri. Hal inilah yang akan penulis bahas. Pada artikel kali ini, penulis membahas perkawinan sirius dari perspektif hukum islam dan hukum positif, serta melihat kuatnya pernikahan Isbat Nikki Sirri. Selain itu, fokus penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Pekanbaru.

Oleh karena itu, Isbat Nikah Sirri Pengadilan Agama Pekanbaru bermaksud melakukan peninjauan kembali sesuai hukum dengan menganalisis perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Pekanbaru atau atas permintaan Isbat Nikah Sirri.

E. Konsep Oprasional

a) Pelaksanaan permohonan adalah permohonan yang diajukan dengan surat permohonan yang ditandatanganin oleh pemohon yang kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama.[33]

b) Isbat adalah penetapan, pengukuhan, pengiyaan, dalam arti menganggap sesuatu tetap benar.[34]

c) Nikah adalah merupakan suatu ikatan lahir maupun bathin antara seorang pria maupun wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[35]

d) Sirri berasal dari bahasa Arab yaitu sirra israr yang artinya rahasia nikah sirri adalah perkawinan rahasia menurut maknanya.Pada

[33] Nurhadi, *Pernikahan dan Perkawinan*, 2018, Cetakan ke 2,hlm, 25
[34] Dahlan, *Hukum Agama Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm, 4
[35] Ibrahim, *Hukum Pernikahan Agama Islam*, Bandung, 2013, hlm, 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prakteknya nikah sirri merupakan perkawinan yang belum banyak orang saksikan dan tidak di hadapan PPN atau KUA local. Pada awal pengertian nikah sirri itu diajukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana di kemukakan oleh Umar bin Khatab.[36]

e) Pengadilan Agama Pekanbaru adalah yang melaksanakan kekuasaan peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agungkota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kemudian Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum observasi *(observational research)* dengan melakukan survey langsung ke tempat penelitian untuk mempelajari dan memperoleh kebenaran yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan atau kenyataan di masyarakat.Sementara dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.[37]

Penelitian ini bersifat deskriptif.Adalah penelitian yang tertuju pada sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap defenisi fundamental dan hukum seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan).Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analitis maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang Permohonan Isbat

[36]Djubaidah, Op.cit, hlm, 345
[37] Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: LP3ES,2012, hlm, 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarnakan adanya suatu permasalahan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Dan hal inilah dan menjadi ketertarikan penulis dalam memilih lokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang memiliki sifat dan krakteristik tertentu dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Kemudian yang menjadi sampel dalam penelitian ini.Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru.[38]

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang hendak diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dari keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling karna dimana penelitian menentukan pengambilan dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat

[38] Ibid, hlm, 174

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjawab permasalahan penelitian oleh karna jumlah populasi dalam penelitian ini relative banyak.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 1 orang
b. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 1 orang
c. Para pihak, yaitu Pemohon yang mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dikabulkan berjumlah 16 orang dan yang tidak dikabulkan berjumlah 25 orang

Agar lebih jelas tentang populasi dan sampel ini bisa dilihat melalui table berikut:

Table 1.2
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100%	Sensus
2.	Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100%	Sensus
3.	Para pihak a). Dikabulkan	16	4	30%	Porposive Sampling
4.	b). Tidak dikabulkan	25	7	30%	Porposive Sampling

SumberData :Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

4. Sumber Data

a.Data Primer

Data Primer adalahbahan yang menjadi sumber utama.Yaitu data yang di peroleh peneliti melalui observasi atau secara langsung dari lokasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian yang bersumber dari responden dan merupakan data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada pihak Isbat Nikah yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b.Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, makalah seminar, perundangan, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dan informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan di jawab secara lisan pula. Penulis menggunakan tipe wawancara yang terfokus, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dan tidak menyimpang dari topik penelitian.

b. Kuesioner yaitu Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang menanyakan pertanyaan dan jawaban langsung kepada responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta kuesioner secara langsung kemudian dikumpulkan dan di klasifikasikan menurutMasalah utama, kemudian pengelolaan data berdasarkan wawancara yang dijelaskan dalam kalimat, dan membandingkannya dengan teori, penulis akan menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam konteks penerjemahan rencana penulis sesuai dengan rumusan masalah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pedoman hukum Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Isbat Nikah Sirri.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif. Deduksi adalah cara berpikir yang pertama menerapkan hal-hal umum dan kemudian menghubungkannya ke bagian tertentu. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus, yaitu kesimpulan bahwa permohonan Isbat Nikah Sirri dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Hukum Nikah Sirri

1. Pengertian dan Sejarah Nikah Sirri

Istilah Nikah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab, kata sirri berasal dari kata *sarra, yasirru sirran, atau sir* sebagai bentuk isim mashdar yang berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Berbicara sejarah, nikah sirri sudah lama sekali dikenal oleh masyarakat, nikah sirri itu dikenal sejak masa Khalifah Umar bin khathab.

Apabila berbicara politik, khalifah dalam arti etimologis adalah menggantikan seseorang, Namun dalam semboyan politik Islam sunni, Artinyalebih kepada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti dalam kepastiannya sebagai pemimpin masyarakat tetapi bukan fungsi kenabiannya.[39]

Nikah sirri dulu pada konsepnya berbeda dengan pengertian sekarang, karna dalam kitab-kitab klasik nikah sirri itu merupakan pernikahan yang tidak disebarluaskan ataupun pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat luas dimana dulu caranya dengan memukul duff dan juga yang dikatakan nikah sirri dulu adalah pernikahan yang pelaksanaannyatidak menghadirkan dua orang saksi didalam pernikahan, karnajika didalam pelaksanaan pernikahan itu tidak dihadirkan saksi maka pernikahan mereka akan dikatakan sebagai pernikahan yang rahasia taupun nikah sirri karena kedudukan seorang saksi itu penting,

[39] Candra, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimana ia akan menjadi suatu bukti bahwa pernikahan bener-bener sudah dilaksanakan, ini berdasarkan pendapat dari Imam al-Syafi'i.

Pendapat tersebut diambilnya dari Umar Bin Khathab dimana saat itu ia mendatangi suatu pernikahan itu tidak menghadirkan dua orang saksi sehingga Umar menyatakan bahwa pernikahan tersebut tergolong kepada pernikahan sirri, para pelakunya dapat diberikan hukuman rajam apabila mereka tetap lanjut melanjutkannya.

Kemudian Rasulullah SAW dan Umar bin Khathab juga pernah menyatakan tentang nikah sirri syarat yang tidak diumumkan ke masyarakat luas dengan cara memukul *duff,* dan ini termasuk kedalam pernikahan sirri dimana mereka yang melaksanakan pernikahan tidak membakar sesuatu sampai terlihat asap yang merupakan suatu tanda bahwa telah terjadinya suatu pernikahan.[40]

Jadi, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah yaitu mengumumkan nikah dan adanya saksi sirri yang artinya diam-diam dianggap oleh beberpa kalangan ulama, seperti ulama Malikiyah sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari ketentuan rukun tersebut.[41]

Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditunjukan atau dimaknakan terhadap perkawinanyang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khathab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri

[40] Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 180
[41] Asep Saepudin Jahar, Dian Syafrianto, *Nikah Sirri*, Semarang, 2013, hlm, 4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA bagi orang yang beragama Islam.[42]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri pada saat sekarang ini ialah termasuk kepada pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada didalam pernikahan akan tetapi mereka yang melaksanakan pernikahan tidak mencatatkannya di KUA, sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka benar-benar sudah menikah, dan negara tidak akan pernah mengganggap mereka benar-benar sudah menikah, dan negara tidak akan pernah menganggap mereka sudah menikah jika tidak ada bukti akta nikahnya.

Secara agama dan adat istiadat nikah sirri itu sah jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, tetapi pernikahan itu tidak diumumkan kepada masyarakat luas dan juga tidak dicatatkan di KUA. Mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya mempunyai beberapa alasan yaitu karna alasan tidak ada biaya, tidak sanggup membayar administrasi pencatatan, belum cukup umur untuk menikah di KUA padahal ia dapat mengajukan dispensasi nikah tetapi lebih memilih untuk menikah secara sirri yang mengakibatkan pernikahnnya tidak dicatatkan dan juga berbagai alasan lainnya. Ada juga nikah yang di rahasiakan karna mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karna takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah

[42] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 345.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sirri atau karna pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksaseseorang yang merahasiakannya.[43]

Nikah sirri terkadang dapat disebut juga dengan nikah misyar, dan nikah urfi, akan tetapi istilah nikah misyar dan nikah urfi itu jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk kesamaan antara istilah itu terletak pada bentuk pernikahannya, dimana ia sama-sama dirahasiakan atau tidak diumumkan ke masyarakat banyak dan juga tidak dicatatkan secara resmi. Masyarakat Indonesia banyak memberikan istilah pada nikah sirri tersebut ada yang mengatakan nikah diam-diam, nikah dibawah tangan, nikah yang tidak dicatatkan.Apabila dilihat dari etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia dan dirahasiakan.[44]

Berdasarkan hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik, perkawinan yang dianggap sah itu jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Seperti adanya ijab dan kabul, adanya wali dari pihak perempuan, dihadirkan 2 orang sebagai saksi dalam pernikahan dan itu haruslah sesama muslim. Pada peraturan yang ada dalam kitab klasik yang ini tidak ada yang mengatur kewajiban untuk mencatatkan pernikahan. Namun dengan kemajuan perkembangan zaman telah memberikan dorongan kepada ulama untuk memperbarui aturan tentang pernikahan, dan negara-negara muslim yang tersadar akan pentingnya suatu pencatatan pernikahan tersebut agar pernikahan yang dilaksanakan itu mempunyai bukti yang jelas.[45]

[43]Repo, *iain-tulungagung.ac.id*, diakses tanggal 9 Maret 2021
[44] Abdurrahman Masykur, *Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta, 2012, hlm, 107
[45] Ibid, hlm, 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut ulama fikih makna dari nikah sirri itu ada dua, yaitu pertama, karna pernikahannya tidak memiliki kelengkapan rukun karna itulah pernikahnnya di rahasiakan oleh orang banyak dan ini tidak sah dan kedua, ada juga pernikahan yang rukunnya terpenuhi tapi tidak diumumkan kepada khalayak banyak dan ini sah menurut agama tetapi sunnah dari *walimarulurs* tidak didapatkannya, *walimarulurs*itu adalah resepsi pernikahan, akan tetapi permaknaan ini tidak dianjurkan oleh agama Islam, karna walimah itu sangat penting sebagaimana yang telah di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan "Laksanakanlah walimahwalaupun hanya dengan seekor kambing".

Tidak hanya memerintah, sahabat Anas pernah berkata ketika Rasullulah SAW menikahi seorang perempuan, beliau meminta agar mengundang beberapa orang (laki-laki) untuk makan. Dan ketika waktu tiba Nabi Muhammad menjadi seorang pengantin dengannya Zainab bin Jasy, dan kemudian beliau mengundang masyarakat untuk hadir didalam pernikahannya. Banyak sekali nilai positif yang dapat diambil dari mengumumkan pernikahan ini, karna dengan adanya pengumuman pernikahan kedua pasangan terhindar dari yang namanya fitnah dan dengan adanya bukti pencatatan mereka tidak akan bisa meninggalkan tanggung jawab terhadap pasangannya masing-masing.[46]

Sepanjang rukun nikah itu dapat di penuhi maka nikah sirri dalam Islam dapat menjadi sah, dimana dalam rukun itu terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, adanya ijab dan kabul jika pelaksanaan nikah sirri syarat dan

[46] http://m. detik.com/news/kolom/3662146/jagalah-hati-jangan-nikah-sirri, diakses tanggal 9 maret 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rukunnya terpenuhi maka sudah jelas pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut Islam, hanya saja tidak ada dicatatkan di KUA, dan Negara tidak mengakui adanya pernikahan tersebut.[47]

Aturan tentang pencatatan sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dimana aturan ini menjelaskan tentang administrasi dalam perkawinan dan ditegaskan untuk mencatat perkawinannya di KUA.Kemudian aturan masalah pencatatan ini di perkuat dengan aturan didalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[48]

Pencatatan perkawinan diluar dalam pasal 5 KHI, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Mengenai sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan di Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, yaitu: setiap perkawinan haruslah dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan adanya perkawinan haruslah dicatatkan.[49]

Nikah Sirri merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa diketahui oleh KUA itu sebagai institusi Negara yang melaksanakan pencatatan

[47] Mualy, *Pernikahan dan Perkawinan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 9
[48] Ibid, hlm, 26
[49] Abdullah, *Hukum Pernikahan Agama Islam,* Bandung, 1991, hlm, 99

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan bagi umat Islam.Dalam AL-Qur'an memang tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, tetapi dalam hal ini dapat disangkut pautkan dengan penjelasan dalam AL-Qur'an tentang buktinya suatu alat bukti, ini sebenarnya adalah ayat yang mengharuskan kita untuk mencatatkan segala perjanjian.Dalam AL-Qur'an sudah jelas masalah status dalam ikatan perkawinan dimana suami istri mengikatkan hubungan dan Ijab Kabul sebagai suatu transaksi yang penting.

Surat An-Nisa Ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"

Surat An-Nur Ayat 24:

يَعْمَلُوْنَ كَانُوْا بِمَا وَاَرْجُلُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ عَلَيْهِمْ تَشْهَدُ يَّوْمَ

Artinya : "pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan".

Surat An-Nur Ayat 33:مِنْ اللّٰهُ يُغْنِيَهُمُ حَتّٰى نِكَاحًا يَجِدُوْنَ لَا الَّذِيْنَ يَسْتَعْفِفِ وَالْ وَّاٰتٰىهُمْ خَيْرًا فِيْهِمْ عَلِمْتُمْ اِنْ فَكَاتِبُوْهُمْ اَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتٰبَ يَبْتَغُوْنَ وَالَّذِيْنَ ۚفَضْلِهٖ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

تَحَصُّنًا اَرَدْنَ اِنْۢ الْبِغَآءِ عَلَى فَتَيٰتِكُمْ تُكْرِهُوْا وَلَا ۗ اٰتٰىكُمْ ىِٕالَّذِ اللّٰهِ مَّالِ مِّنْۢ تُوْهُمْ غَفُوْرٌ اِكْرَاهِهِنَّ بَعْدِ مِنْۢ اللّٰهَ فَاِنَّ يُّكْرِهْهُّنَّ وَمَنْ ۚ الدُّنْيَا الْحَيٰوةِ عَرَضَ لِّتَبْتَغُوْا رَّحِيْمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".

2. **Faktor terjadinya Nikah Sirri**

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di KUA, yaitu karna faktor tidak adanya biaya, ada juga karna takut melanggar aturan yang melarang PNS menikah lebih dari satu, adanya pertimbangan tertentu dari para pihak sehingga harus merahasiakan pernikahannya.Dikarenakan pihak ingin menikah masih sekolah, masih dibawah umur, karna ingin memiliki keturunan jadi suami menikah lagi agar mendapat keturunan dari istri sirrinya.[50]

[50] Ali, *Pernikahan dan Perkawinan*, Pustaka Setia, Bandung, 2003, hlm, 120

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. **Dampak dari pada Nikah Sirri terhadap perempuan dan anaknya**

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan suatu dampak, seperti:[51]

a. Perkawinan akan dianggap tidak sah oleh Negara, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun dimata Negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karna belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, artinya anak tidak akan dapat menuntut hak-hak dari ayah. Kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dalam hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak) anak-anak ini berstatus anak diluar perkawinan.

Dari dampak nikah sirri tersebut, sudah jelas banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan terhadap istri dan anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan dilahirkannya anak dalam perkawinan sirri ataupun perkawinan sirri ataupun perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak ini menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dalam hal ini melanggar hak asasi anak, sama halnya dengan melanggar HAM dari anak tersebut.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati

[51] Mualy, ibid, hlm, 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimiliki pada diri manusia bersifat Universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan di pertahankan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.[52]

Karna sebab itulah peran orang tua sangat penting, peran orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karna dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seharusnya dilindungi, karna Anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.[53]

Dalam hal itulah, pencatatatan perkawinan itu sangat penting karna melalui pencatatan itu Negara bisa memperkuat perlindungan pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan dapat mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulknnya, karena pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga apabila suatu saat nanti mereka mempunyai maslah dalam rumah tangganya pihak dari KUA tidak bisa memberikan keputusan dan tidak bisa menerima pengaduan dari para pihak yang melakukan nikah sirri atau pun pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA.[54]

Berdasarkan hal inilah, setiap orang yang ingin melakukan pernikahan sirri tidak mempunyai alasan untuk membenarkan perbuatannya, karna sudah jelas

[52] Muslikah, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Bandung, 2017, hlm, 24
[53] Meilan, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 90
[54] *http://m..detik.com/news/kolom/3662146/jagalah -hati-jangan-nikah-sirri*, diakses 9 maret 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agama dan Negara sangat melarang adanya nikah sirri tersebut karna nikah itu seharusnya dilaksanakan dengan baik dan benar serta diakui oleh orang banyak dan setiap pasangan seharusnya bahagia jika pernikahnnya sah menurut Agama dan Negara dengan begitu tujuan dari pernikahan akan tercapai yaitu menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Tinjauan Tentang Hukum Isbat Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah jika diartikan menurut bahasa memiliki arti penetapan.Kata Isbat nikah awalnya adalah "Isbat Nikah" Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah itu ialah suatu penetapan tentang kebenaran dalam suatu pernikahan yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA.[55]

Jika dilihat dari aspeknya, Undang-Undang sudah memberikan aturan tentang perkawinan yang sah, yaitu terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pernikahan yang sah jika dilaksnakan diluar ketentuan agama masing-masing masyarakat.

Kemudian di pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan tentang keharusan pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan didalam suatu perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak, dimana pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban kemashlatan

[55] Kebudayaan, *Pernikahan dan Perkawinan*, Bandung, 1995, hlm, 339

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap anak yang akan dilahirkan nanti, maka mereka berhak mendapatkan akta nikah dimana akta nikah itu menjadi suatu bukti telah terjadinya suatu pernikahan diantara mereka berdua.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pencatatan ini, pada kenyataannya masih banyak masyarkat yang tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahnnya padahal sudah jelas pencatatan itu sangat memberikan keuntungan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan termasuk juga akan dapat melindungi kaum perempuan dan anak-anak.[56]

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI sudah dijelaskan bahkan sudah ditegaskan bahwa jika memang sudah terjadi suatu pernikahan, itu hanya bisa diberikan bukti seperti akta nikah, jika akta nikahnya tidak ada maka pernikahan itu dianggap tidak akan pernah terjadi, karna akta nikah adalah satu-satunya bukti bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan namun berdasarkan Undang-Undang perkawinan yang menjadi bukti bukan hanya akta nikah, karna itu bukan alat bukti yang menentukan sahnya suatu perkawinan, yang menentukan perkawinan itu sah adalah Agama.[57]

Tentang pencatatan perkawinan perkawinan sendiri dapat dilihat pada aturan Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan sahnya dan ketertiban suatu perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 4 dan 5 KHI.Kemudian dilanjutkan dengan pasal 6 dan 7 KHI yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dan apabila ada yang tidak mencatatkan pernikahnnya, maka mereka bisa mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

[56] Rofiq, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm, 107
[57] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm, 114

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam mengajukan isbat nikah itu mempunyai batasan-batasan tertentu atau dengan alasan yang sudah di tentukan pada pasal 7 KHI yaitu perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, maksudnya apabila pihak ingin melakukan perceraian namun tidak bisa memberikan akta nikahnya maka dapat mengajukan isbat nikah, kemudian dengan alasan akta nikahnya hilang itu dapat mengajukan isbat nikah, jika para pihak ragu akan sahnya pernikahan mereka yang dapat mengajukan isbat nikah, terjadinya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan juga dapat mengajukan isbat nikah, dan perkawinan juga yang dilakukan oleh para pihak yang tidak mempunyai halangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Memang dalam aturan Islam tidak ada yang mengharuskan adanya pencatatan didalam suatu perkawinan, Baik itu dalam Al-Qur'an dan hadits, namun melihat kondisi pada saat ini mau tidak mau pencatatan perkawinan itu harus tetap diberlakukan dan diterapkan dilingkungan masyarakat, karna sudah jelas jika perkawinan mereka tidak tercatat akan menimbulkan mudharat yang sangat banyak dan merugikan diri mereka sendiri dan juga anak-anak mereka. Dalam Islam sudah dinyatakan bahwa yang namanya mudharat itu harus dihindarkan seperti yang sudah dinyatakan dalam kaidah fikih bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan.[58]

Untuk pengaturan pernikahan sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu peraturan berdasarkan syara' yang merupakan suatu aturan yang ditentukan oleh syari'at Islam dimana terpenuhinnya semua syarat dan rukun dalam pernikahan

[58] Ali, *Hukum Pernikahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan kemudian adanya peraturan tawsiqy yang merupakan suatu aturan tambahan yang memiliki tujuan agar pernikahan yang dilakukan tidak secara liar akan tetapi pernikahan yang sudah tercatat dan pihakyang menikah mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti berdasarkan pendapat dari Syekh Jaad al-Haaq Ali Jaad al Haq.[59]

Dari sinilah kesimpulan pencatatan itu muncul karna untuk hutang saja harus dicatatkan apalagi untuk pernikahan yang dimana ia adalah suatu ikatan yang sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an Surah an-Nisa ayat 21:

وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Al-qur'an Surah N-Nisa ayat 22:

وَّمَقْتًا فَاحِشَةً كَانَ اِنَّهٗ ۗ سَلَفَ قَدْ مَا اِلَّا النِّسَاۤءِ مِّنَ اٰبَاۤؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنْكِحُوْا وَلَا سَبِيْلًا وَسَاۤءَ (Wa laa tankihuu maa nakaha aabaaa'ukum minan nisaaa'i illaa maa qad salaf; inahuu kaana faahishatanw wa maqtanw wa saaa'a sabiilaa)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)"

Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 23:

وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ وَخٰلٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ
نِسَاۤىِٕكُمْ اُمَّهٰتُ وَ الرَّضَاعَةِ مِّنَ وَاَخَوٰتُكُمْ اَرْضَعْنَكُمْ الّٰتِيْٓ وَاُمَّهٰتُكُمُ الْاُخْتِ

[59] Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm, 38

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

دَخَلْتُمْ تَكُوْنُوْا لَّمْ فَاِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ الّٰتِيْ نِّسَاۤىِٕكُمْ مِّنْ حُجُوْرِكُمْ فِيْ الّٰتِيْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ
بَيْنَ تَجْمَعُوْا وَاَنْ اَصْلَاۤبِكُمْۙ مِنَ الَّذِيْنَ اَبْنَاۤىِٕكُمْ وَحَلَاۤىِٕلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا بِهِنَّ
ۗ رَّحِيْمًا غَفُوْرًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗسَلَفَ قَدْ مَا اِلَّا الْاُخْتَيْنِ

(Hurrimat 'alaikum umma haatukum wa bannaatukum wa akhawaatukum wa 'ammaatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukhti wa ummahaatu kumul laatiii arda' nakum wa akhawaatukum minarradaa'ati wa ummahaatu nisaaa'ikum wa rabaaa'i bukumul laatii fii).[60]

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 24:

مَّا لَكُمْ وَاُحِلَّ ۚعَلَيْكُمْ اللّٰهِ كِتٰبَ ۚاَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا اِلَّا النِّسَاۤءِ مِنَ وَّالْمُحْصَنٰتُ
بِهٖ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا ۗ ۗمُسَافِحِيْنَ غَيْرَ مُّحْصِنِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوْا اَنْ لِكُمْ ذٰ وَرَاۤءَ

[60] *http://www.nu.or.id./post/read/38146/kepastian-hukum-quoitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan.* diakses tanggal 9 Maret 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

بَعْدِ مِنْۢ بِهٖ تَرٰضَيْتُمْ فِيْمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا ۗ فَرِيْضَةً اُجُوْرَهُنَّ وَهُنَّ تُفَاٰ مِنْهُنَّ حَكِيْمًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗ الْفَرِيْضَةِ

(Walmuhsanaatu minan nisaaa'i illaa maa malakat aimaanukum kitaabal laahi 'alaikum; wa uhilla lakum maa waraaa'a zaalikum an tabtaghuu bi amwaali kum muhsiniina ghaira musaa fihiin; famastamta'tum bihii minhunna fa aatuuhunna ujuurahunna fariidah; wa laa j)

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Kemudian alasan adanya pencatatn itu adalah karna *maslahat mursalah*yang merupakan suatu maslahat yang tidak dianjurkan dan juga tidak ada dilarang oleh syari'at dalam Islam, Dimana ia hadir hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, dan maslahat ini merupan suatu prinsip yang hadir untuk memberikan ketetapan hukum dalam Islam.

2. **Manfaat Isbat Nikah**

Untuk manfaat sendiri, tentu isbat nikah sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinnaya dulu, karna untuk membuktikan bahwa mereka bener-bener sudah menikah haruslah ada akta nikah, akta nikah merupakan suatu bukti autentik yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sudah menikah. Karna itulah isbat nikah itu sangat bermanfaat pernikahnnya agar terhindar dari banyaknya fitnah-fitnah yang akan muncul di kemudian hari.

Sudah menjadi suatu kesepakatan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan agar terwujudnya ketertiban hukum didalam masyarakat serta kepastian dalam perlindungan hukum. Karna itulah jika ada diantara mereka yang tidak mencatatkan perkawinanya akan diberikan sanksi pidana, walaupun itu masih menjadi suatu rencana, tapi itu juga penting agar memberikan efek jera bagi mereka yang tidak mau mencatatkan pernikahnnya.[61]

C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru

1) Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14, sampai 101 34 bujur timur dan 0 25, sampai 0 45 bintang utara, keadaan topografi pada bagian pusat kota relative landai (datar) sedangkan diutara, topografi didaerahnya datar dan sebagaian bergelombang, ketinggian dari permukaan laut sekitar antara 5-50 Meter. Pinggiran Kota Pekanbaru pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam yang korosit untuk besi. Kota Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 km yang terdiri dari 12 kecamatan.[62]

Adapun batas-batas wilayah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Siak.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

[61] Ashruddin Salim, *Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta, 2003, hlm, 70
[62] *http://Pekanbaru go.id (diakses 20 Maret 2021)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Palalawan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru beriklim tropis, dengan temperature maksimum berkisar antara 31,6 C Sampai dengan 33,7 C, temperature minimum 22,0 C sampai 23,3 C dan mempunyai dua musim yaitu musim Hujan dan Kemarau.[63]

2) Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 1957 dan lmbara Negara Tahun 1957.[64] Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah di Sumatera dalam penetapan tersebut ada ama yakni Pengadilan Agama yang dikenal bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.[65]

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru Khususnya Riau maka di usulkan lain beberapa pimpinan Pengadilan Agam/Mahkamah syari'ah Pekanbaru KH.Abdul Malik Anggota Mahkamah Syari'ah yang berkrdudukan di Bukit Tinggi dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH.Mansyur, ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Bukit Tinggi Bapak KH.Juanaidi, Kepala

[63] *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, 2010*
[64] *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957*
[65] *http://Pekanbaru, go.id, (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 02:00)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jawatan Pengadilan Agama Jakarta Pada Tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama mahkamah syariah Pekanbaru, dengan dilantiknya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetpkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 Tahun.[66]

Pada awal beroperasinya Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya mnempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru dijalan Rambutan kecamatan Pekanbaru kota. Dengan model yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dijalan sam Ratulangi kecamatan Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengaadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor agama Penkanbaru pindah kantor jalan kartini kecamatan Pekanbaru kota dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H,Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama selat Panjang kepada Drs.H.Amir idris. Pada saat kepemimpinan ketua bapak Drs.H.Amir Idris

[66] http://Pekanbaru.go.id, *(diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 02:00)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dijalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali perganatian Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs.Marjohan Syam (1994).Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs.Masrum,Mh, maka pada bulan april 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dijalan rawa indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah kantor dengan menyewa penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat na'if, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenaan membayar sewa untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di komplek Kanwil Dapartemen Agama Provinsi Riau, Termasuk Wali kota, Bapak Dr,H.Herman Abdullah MM yang sejak tahun 2005 telah memberhatihan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru kedalam Protocol Muspida dan member Fasilitas mobil untuk Jabatan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

3) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu: ialah "Terwujud nya Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A yang bersih dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT" sedangkan Misi ialah:[67]

a. Menjaga keamanan dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A.
b. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A
d. Meningkatkan kredibialitas tranparansi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

4) Struktur Organisasi Pengadilan Agama pekanbaru Kelas 1 A

Struktur sistematika organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A adalah sebagai berikut:[68]

Tabel 2.1

DATA HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NO	NAMA-NAMA HAKIM	JABATAAN
1	Drs.H. ABDUL THALIB ZISMA	KETUA HAKIM
2	Drs.MUH.HUSAIN SHALEH,SH,MH	WAKIL KETUA
3	Dra.Hj. NOVIARNI, SH,MH	HAKIM
4	Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M,A	HAKIM
5	Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, S.H	HAKIM
6	Dra. HJ. MARIATI	HAKIM
7	Drs. H. DARMAWI, MH	HAKIM
8	Drs. ZAINY USMA, S.H	HAKIM
9	Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH	HAKIM

[67] *Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul02:00.*
[68] *Data Statistik, Pengadilan Agama Pekanbaru, Tahun 2021.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10	Dra. Hj. SYAMSIYAH S.H,M.H	HAKIM
11	H.BAKHTIARLATIF, S,Ag,M.H	HAKIM
12	Dr. H. ABD JABBAR HMD, S.H	HAKIM
13	Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.HUM	HAKIM

Sumber Data: Data Olahan Wawancara

Uraian Tugas (*Jobdiscrition)* di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru lebih rinci sebagai berikut:[69]

a. Ketua Hakim

Melakukan Peningkatan Kualita,Efektifitas kineja lingkungan, dan Mewujudkan Aparatur, Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, yang professional bersih, dan berwibawa.

b. Wakil Ketua

Menyelesikan Perkara banding dan membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan hakim.

c. Hakim

Meneliti, memeriksa, mengadili dang memutus perkara, dan menyelesaikan mutasi.

Tabel 2.2
DATA PANITERA DAN PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN AGAMA PEKANABARU

NO	NAMA-NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	AGUSLIM	JURUSITA
2	SYUKRI	JURUSITA
3	KOMARIA	JURUSITA PENGGANTI
4	HIDAYAH	JURUSITA PENGGANTI
5	RIRI ARTATI	JURUSITA PENGGANTI
6	WAWAN SWANDI	JURUSITA PENGGANTI
7	HABIBUMNNAZAR	JURUSITA PENGGANTI
8	ALMISRI	JURUSITA PENGGANTI
9	ADEK HENDRA	JURUSITA PENGGANTI

[69] *Berdasarkan wawancara survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021), Pukul 02:00.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber Data: Data Olahan Wawancara

Uraian tugas *(Jobdiscrition)* di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru lebih rinci sebagai berikut:[70]

a. **Panitera/Sekretaris**
   Koordinasi dan Pengawasan kegiatan administrasi Kepaniteraan dan penerimaan realisasai anggaran serta laporan.
b. **Wakil Panitera**
   Pengawasan Kegiatan Administrasi Kepaniteraan dan Pembinaan Staf.

Tabel 2.3
DATA PEJABAT ADMINISTARASI SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NO	NAMA-NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	HENNYMUSYARROFAH,S.H,	WAKIL SEKRETARIS
2	FADUL AKYAR	KASUBAG KEPEGAWAIAN
3	YUFRIZAL,S.H,.M.H	KASUBAG KEUANGAN
4	EEFENDI,S.Ag	KASUBAG UMUM
5	ZULIANI,S.Ag	STAF
6	RINA RAMADANI,S.E,.M.H	STAF
7	ELPITRIA,S.HI,.M.H	STAF
8	ERIZON	STAF
9	SRI YUNIDARTI	STAF
10	AMIR LUFFI ZAINUDDIN	STAF

Sumber Data: Data Olahan Wawancara

Uraian tugas *(Jobdiscrition)* di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru lebih rinci sebagai berikut:[71]

a. **Wakil Sekretaris**
   Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggan lainnya.
b. **Kasubag Kepegawaian**
   Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian, menerima, mengelola, dan menyalurkan surat masuk dan keluar.
c. **Kasubag Keuangan**

[70] *Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 02:00.*
[71] *Berdasarkan Wawancara Survei Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 02:00.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

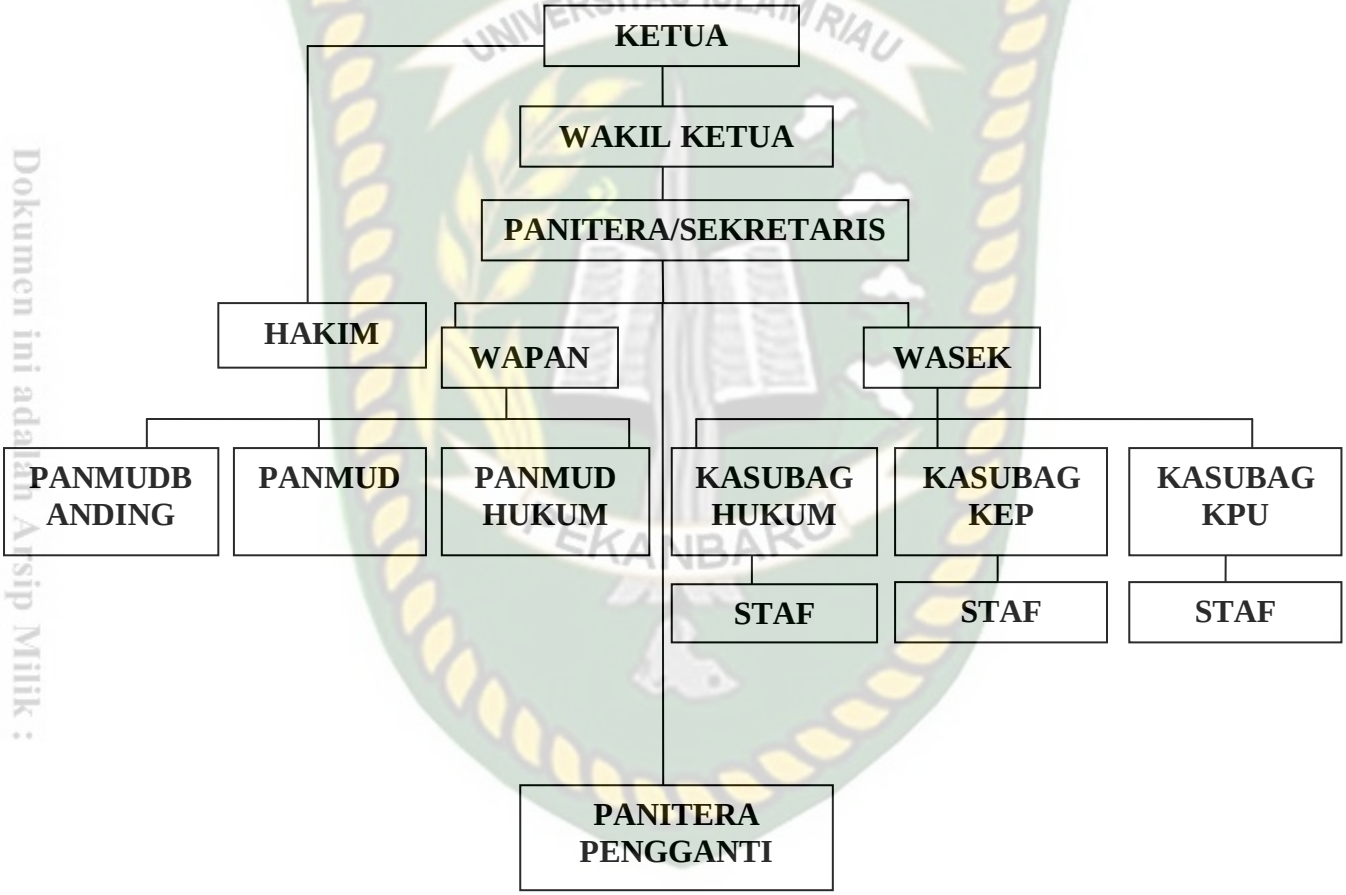
Menyelenggarakan administrasi dibidang keuangan dan membuat perencanaan anggaran di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.

d. Kasubag Umum

Menyelenggarakan administrasi dibidang umum dan melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor.

5) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur 2.4



Uraian tugas (Jobdiscrition) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru lebih rinci sebagai berikut:[72]

1. Ketua

[72] *Berdasarkan Wawancara, di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, Pada Tanggal 20 Maret 2021.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Melakukan peningkatan kualitas, efesiensi dan efektifitas kinerja lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.
b. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yang profesional bersih, berwibawa, dan berakhlakulkarimah.

2. Wakil Ketua

a. Menyelesaikan perkara banding yang disesrahkan kepadanya.
b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan hakim dan putusan.

3. Hakim

a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkarayang diserahkan kepadanya.
b. Menyelesaikan minutasi.

4. Panitera/Sekretaris

a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi sekretariatan dan kepaniteraan.
b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
c. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
d. Pembinaan staf.

5. Wakil Panitera

a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi.
b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
c. Pembinaan staf

6. Panitera Muda Gugatan

a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundel A yang diserahkan kepadanya.
b. Menerima, mencatat, member nomor register, menyiapkan berkas perkara banding kedalam buku register serta member singkat tentang isinya kepada ketua majelis kepaniteraan muda gugatan.

7. Panitera Muda Hukum

a. Menerima, mencatat, menyalurkan menyelesaikan surat masuk dan surat keluar bidang kepaniteraan muda hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin dll.

8. Panitera Pengganti

a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti.

b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan dalam persidangan dalam bentuk berita acara.

9. Wakil Sekretaris

a. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggan lainnya.

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya.

10. Kasubag Kepegawaian

a. Menyelengarakan administrasi dibidang kepegawaian.

b. Menerima, mencatat, mengelola dan menyalurkan surat masuk dan surat keluar dll.

11. Kasubag Umum

a. Menyelengarakan administrasi di bidang umum.

b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub umum.

12. Kasubag Keuangan

a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.

b. Membuat perencanaan anggaran di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Bila dilihat praktik Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka isbat nikah sirri dapat dikelompokkan dalam dua perkara, yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius.Perkara Voluntair adalah suatu perkara yang didalamnnya tidak terdapat suatu sengketa, yang dimaksud tidak ada sengketa disini ialah bener-bener murni dan mutlak hanya satu pihak yang mempunyai kepentingan didalam perkara tersebut.[73]

Adapun yang dimaksud dengan perkara kontentius.[74] Ialah suatu perkara yang didalamnya terdapat suatu sengketa diantara para pihak berperkara yang pemeriksaan penyelesainnya diberikan dan diajukan ke Pengadilan. Maksud kontentius disini adalah suatu perkara itu terdiri dari yang namanya melawan termohon, kemudian ada juga permohonan yang diajukan oleh salah satu dari suami istri tersebut dan diantara suami istri itu ada yang menjadi termohon, kemudian apabila diantara suami istri tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain, maka orang lain tersebut haruslah dimasukkan menjadi pihak dalam permohonanitu dan jika permohonan juga dapat diajukan oleh wali nikah, ahli warisataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.[75]

Adapun pelaksanaan Isbat Nikah sirri di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pelaksanaan isbat nikah lainnya. Dapat dilihat dalam 6 Tahap, Yaitu:

[73] Enas Nasaruddin, *Nikah Sirri,* Pustaka Setia, Semarang, 2013, hlm, 3
[74] Harahap, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung, 2008, hlm,47
[75] *http://repository.radenintan.ac.id./692/1/skripsi.pdf*, Diakses tanggal 9 Maret 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Pendaftaran perkara/Meja
b) Pembayaran Biaya Perkara
c) Panitera
d) Ketua Pengadilan Agama
e) Majelis Hakim
f) Pengambilan Produk Pengadilan.

Prosedur pengajuan gugatan maupun permohonan Isbat nikah sirri juga sama dengan prosedur gugatan ataupun permohonan isbat nikah lainnya. Yaitu proses dibagian ke paniteraan yang mana sekarang dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

a) Pendaftaran Perkara

Pemohon menandatangai Pengadilan Agama Pekanbarubersama dengan surat Pemohon Isbat Nikah dan menjumpai petugas pendaftaran perkara di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas pendaftaran perkara menerima surat Permohonan Isbat Nikah dan salinan yang telah dibuat telah ditandatangani oleh pemohon beserta bukti tanda pengenal (KTP) yang bersangkutan. Petugas pendaftaran perkara besarnya biaya perkara di perkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat 1 Undang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.[76]

Biaya tersebut terdiri dari :

a. Biaya Kepaniteraan dan biaya materai
b. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
c. Biaya pemeriksaan dan perbuatan Hakim yang lain
d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan serta yang lainnya atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Setelah pemohon mendapatkan besaran panjar biaya perkara dari petugas pendaftaran, Pemohon pergi ke Bank Mandiri Syari'ah sebagai Bank Mitra Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membayarkan biaya perkaranya apabila para pihak tidak mampu maka dapat diijinkan berperkara secara predeo (cuma-cuma), dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterngan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.400.000, dan ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).[77]

b) Pembayaran Biaya Perkara

Setelah pemohon membayar biaya perkaranya di Bank, pemohon kemudian membawa bukti setoran pembayaran biaya perkara dan menyerahkannya kepada petugas pembayaran biaya perkara atau dulu yang

[76] Berdasarkan Wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021 pukul 02:00
[77] Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 02:00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikenal dengan kasir, adapun tugas kasir atau petugas pembayaran biaya perkara adalah:

a. Menerima bukti pembayaran biaya perkara dari Bank dan membukukannya
b. Memberikan tanda tangan pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
c. Pada SKUM tersebut diberikan nomor perkaranya dan tanda lunas
d. Menyerahkan uang panjar perkara tersebut kepada bendahara pekara

Setelah SKUM diberi nomor oleh petugas pembayaran perkara/kasir lalu petugas pendaftaran perkara menyerahkan pemohon isbat nikahpemohon kepada petugas register yang dulunya disebut meja II setelah permohonan pemohon dalam register perkara, lalu petugas pendaftaran perkara menyerahkan surat Permohonan Isbat Nikah dan SKUM dan kemudian mengatur berkas perkara dan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.[78]

Proses Selanjutnya :

c) Proses Selanjutnya Di Panitera

Panitera menyerahkan berkas Perkara Isbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama dan menunjuk panitera sidang sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama Panitera sidang membantu Hakim menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

[78] *Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 02:00.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama membaca, mempelajari serta memahami berkas Penunjukkan hakim isbat nikah dan membantu PMH dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah "Penetapan Majelis Hakim" yang ditandatangai oleh Ketua Pengdailan Agamadan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

e) Majelis Hakim

Majelis Hakim membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) terlebih dahulu, kemudian memerintahkan jurusita Mengumumkan perkara Isbat Nikah tersebut dipapan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 hari, setelah sampai 14 hari tidak ada para pihak yang keberatan dalam perkara tersebut, lalu Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintah jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap pemohon, dan pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim menyidangkan perkaranya.

f) Pengambilan Produk Pengadilan

Bila persidangan telah selesai, pemohon mengambil salinan penetapan Isbat Nikah dibagian pengambilan produk pengadilan, petugas pengambilan produk Pengadilan dan kemudian memberikan salinan penetapan kepada pemohon dan pihak-pihak yang terkait serta memberikan berkas yang dijahit kepada panitera muda hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SKEMA 3.1

SKEMA ALUR PENDAFTARAN



Adapun pernikahan isbat nikah sirri sebagaimana telah dijelaskan diatas, terlebih dahulu permohonan atau gugatan pemohon diumumkan selama 14 hari, baru kemudian ditetapkan hari sidangnya oleh Majelis Hakim.Maksud dan tujuan diumumkannya permohonan pemohon adalah untuk memberi kesempatan bagi para pihak yang tidak termasuk dalam pihak permohonan atau gugatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada yang keberatan dan protes terhadap permohonan atau gugatan pemohon, barulah Ketua Majelis menetapkan hari sidang terhadap perkara tersebut, setelah itu barulah Jurusita melakukan pemanggilan terhadap pemohon.

Pada persidangan pertama Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat permohonan pemohon mulai dari identitas, posita, dan petitumnya. Bila dalam permohonan pemohon terdapat kekurangan pihak dalam identitas atau posita

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemohon tidak mendukung petitum permohonan pemohon, maka permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO).

Bila permohonannya sudah benar, dan tidak ada perubahan dan perbaikan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sidang dengan memeriksa alat-alat bukti pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Jika bukti-bukti yang diajukan pemohon dapat menguatkan dalil permohonan pemohon, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya. Tetapi, apabila pemohon tidak dapat mengajukan dan memberikan bukti-bukti ataupun bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak dapat menguatkan dalil permohonannya maka Majelis Hakim menolak permohonan pemohon.[79]

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbarupada Tahun 2020mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnnyapada tahun 2020 perkara isbat nikah masuk melalui perkara permohonan sebanyak 50 perkara dimana pada tahun sebelumnnya, yaitu tahun 2019 perkara isbat nikah melalui perkara permohonan hanya 30 perkara. Dari 50 perkara isbat nikah yang masuk pada tahun 2020 banyak yang dikabulkan, ada 30 perkara yang dikabulkan, sementara sisanya 20 perkara ada yang dicabut, tidak diterima dan dicoret, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

[79] *Berdasarkan wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri, Pada Tanggal 5 Febuari 2020.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table 3.2
Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama PekanbaruPada Tahun 2020

N0	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Terima Bulan Ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Tidak Diterima	Dicoret	Sisa Akhir Bulan
1	Januari	5	1	10	-	3	2	-	5
2	Febuari	5	5	10	1	3	-	-	6
3	Maret	2	3	9	2	1	-	-	2
4	April	6	5	6	1	3	-	1	14
5	Mei	14	5	5	1	20	-	1	5
6	Juni	5	-	5	-	4	-	1	-
7	Juli	-	1	3	-	-	-	-	3
8	Agustus	3	2	7	1	-	-	-	4
9	September	4	8	12	-	-	-	-	8
10	Oktober	8	5	9	1	-	-	-	6
11	November	6	8	11	-	-	-	1	11
12	Desember	11	7	14	1	-	-	-	5
	JUMLAH	69	50	101	8	2	2	4	69

Sumber Data: Pengadilan Agama Pekanbaru2020

Dari tabel diatas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru di setiap bulannya masih tergolong banyak, terhitung ada 50 perkara isbat nikah tersebut lebih banyak yang dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak terima, dicabutdan dicoret. Dari data ini, dapat pula disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru masih ada nikah yang berhalangan dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukti ditahun 2020 ada 8 perkara dicabut, dan 2 perkara di terima dan 4 perkara dicoret.

Dari tabel diatas tergambar juga perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara permohonan isbat nikah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersifat Voluntair.Adapun perkara isbat nikah yang diajukan secara kontentius pada tahun 2020 Tidak ada.

B. Kendala Dalam Proses Permohonan Dalam Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Kendala dalam Proses Pengajuan nikah sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru, di Pengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari pihak yang mengajukan Nilah Sirri, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Adapun pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru pada dasarnya sama dengan pelaksanaan Isbat Nikah. Dapat dilihat yaitu: Pendaftaran Perkara (Pemohon menandatangani Pengadilan Agama Pekanbaru Bersama dengan surat pemohon dan menjumpai petugas perkara), Pembayaran Biaya Perkara (Pemohon membawa bukti setoran pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kepada petugas), Panitera (Menyerahkan berkas perkara dan menunjuk Panitera Sidang), Ketua Pengadilan Agama (Membaca memmahami serta memahami berkas penunjukkan Hakim Isbat Nikah dalam waktu 7 hari), Majelis Hakim (Penetapan hari sidang terlebih dahulu memerintahkan Jurusita mengumumkan perkara Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman selama 14 hari), dan Pengambilan Produk Pengadilan (Pemohon mengambil salinan Penetapan Isbat Nikah).

1. Pernikahan yang dilakukan para pemohon telah sesuai dengan Syari'at Islam, akan tetapi tidak tertera di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan telah dianggap sah secara agama bila dalam pernikahnnya terpenuhi syarat dan rukunnya meskipun tidak dicatatkan di KUA.Syarat-syarat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.Jika syarat-syarat nya terpenuhi, maka perkawiannya sah.[80]

Hanya saja pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah.Jenis pernikahan seperti ini biasa disebut sebagai nikah sirri, nikah tidak tertulis dan nikah dibawah tangan. Walaupun pernikahan sirri tidak dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara agama dianggap sah selama lima rukunnya terpenuhi, yaitu ada wali, ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, ada ijab kabul, dan ada dua orang saksi.[81]

Syarat-syarat pernikahan ada yang berkaitan dengan syarat bagi kedua mempelai, syarat bagi wali dan syarat bagi saksi.Syarat bagi mempelai adalah calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan pernikahan, baik larangan untuk selama-lamanya ataupun dalam waktu tertentu saja.[82]

Adapun syarat bagi wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa,adil dan tidak sedang ihram haji dan syarat bagi saksi adalah laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram haji dan memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab kabul.[83]

Adapun permohonan isbat yang dilaksanakan oleh para pihak, yang mana dulunya pernikahan mereka sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

[80] Sabiq, *Hukum Pernikahan Agama Islam,* Bandung, 1978, hlm, 86
[81] Mukhtar, *Hukum Pernikahan,* Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm, 37
[82]Ibid hlm, 90
[83] Alhamdhani, *Pernikahan dan Perkawinan*, Pustaka Setia, 1989, hlm, 30

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.3

Responden Melakukan Pernikahan Sirri Sesuai Dengan Syari'at Islam Tahun 2020

No	Alternatif Jawaban	Banyak perkara	Presentase
1	Sesuai dengan syari'at Islam	12	100%
2	Tidak sesuai dengan syari'at Islam	0	0
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 100% dari 12 perkara isbat Nikah Sirri yang menjadi sampel dalam penelitian ini semuanya dikabulkan. Hal ini di putus kabul Majelis Hakim karna semua pernikahnnya sesuai dengan syari'at Islam artinya semua pernikahan yang dilakukan para pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa pemohon isbat nikah sirri yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana dalam aturan pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Kemudian dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada seorang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru bernama Rahmiwati andreas, Hakim tersebut menyebutkan bahwa pada umumnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan yang mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama pekanbaru telah sesuai dengan Syari'at Islam, Namun karena pernikahannya dilaksanakan secara sirri dan tidak dilaksanakan di KUA sehingga pernikahan tidak dicatatkan, karna hal itulah para pihak tersebut harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar mendapat Akta Nikah.[84]

Tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 7 halangan perkawinan karena belum mencapai batas minimal usia menikah, pasal 8 halangan perkawinan karena ada hubungan darah maupun hubungan semenda, pasal 9 halangan perkawinan karena masih terikat karena perkawinan dengan orang lain dan pasal 10 halangan perkawinan karena telah talak tiga dalam agama Islam.

Banyaknya permohonan isbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pekanbaru juga karena tidak ada halangan menikah bagi para pemohon sebagimana disebutkan dalam 4 pasal diatas. Bila pernikahan para pemohon otomatis tidak ada yang melanggar pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena aturan tentang halangan menikah karena hubungan darah, hubungan semenda dank arena sudah talak tiga ada diatur dalam syari'at Islam.

Adapun pernikahan yang calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 9, dalam Syari'at Islam diatur berbeda antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Bagi mempelai laki-laki dibolehkan karena Islam membolehkan Poligami, namun bagi calon mempelai perempuan hal ini dilarang, karena dilarang dalam Syari'at Islam.Bila merujuk

[84]*Berdasarkan Wawancara, Survei di Pengadilan Agama pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri* , Pada Tanggal 5 Febuari 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Jika calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan orang lain maka calon mempelai tersebut tidak boleh dinikahkan dan hal ini di praktekkan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dimana Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada yang mengabulkan isbat nikah para pemohon yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang penulis laksnaakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Pernikahan Sirri Para pemohon Yang Di Kabulkan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

NO	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Presentase
1	Pernikahan Pertama	12	100%
2	Pernikahan kedua	0	0
3	Lainnya	0	0
	Jumlah	12	12%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulakan bahwa 100% dari 12 perkara isbat nkah sirri yang menjadi sampel dalam penelitian ini dikabulkan semua karena pernikahan yang dilakukan para pemohon dalam melaksanakan pernikahnnya tidak ada yang terikat perkawinan dengan orang lain. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dikabulkan isbat nikahnya karena tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, artinya permohonan isbat nikah sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan seorang Hakim di pengadilan Agama pekanbaru bernama ASFAWI, bahwa pada umumnya pernikahan sirri yang dilakukan ole para pihak pencari keadilan yang isbat nikahnya dikabulkan adalah pernikahan pertama.

Bila para pemohon sudah pernah menikah sebelumnnya Majelis Hakim pasti memeriksa status pernikahan dengan pasangan sebelumnya, apa sudah cerai atau belum, kalau cerrai mati adalah bukti keterangan meninggal setidak-tidaknya dari keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, dan bila perceraiannya cerai hidup ada bukti Akta Cerai dari pengadilan Agama. Bila bukti-buktinya tidak ada pasti permohonannya akan ditolak atau disuruh cabut oleh Majelis Hakim untuk mengurus perceraiannya terlebih dahulu dengan pasangan yang pertama.[85]

Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri dimana sebelumnnya sudah pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada bukti perceraiannya kemudian mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama pekanbaru, Majelis Hakim biasanya menolak permohonan para pemohon tersebut. Jika para pemohon menyatakan sudah bercerai dengan pasangan pertama namun perceraiannya tidak dilakukan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim biasanya menyarankan para pemohon untuk mencabut permohonannya dan mengurus perceraiannya terlebih dahulu.

[85]*Berdasarkan wawancara Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri, Pada Tanggal 5 Febuari 2020.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bila sudah dapat dapat bukti cerai Majelis Hakim menyarankan kepada pemohon untuk melakukan nikah di KUA.Menyangkut masalah anak yang sudah lahir sebelum menikah baru dilakukan, Majelis Hakim memberikan solusi kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.

Adapun pernikahan para pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan meskipun masuk kategori penghalang untuk menikah namun karena pada pasal 7 tersebut ada solusi untuk calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Ini berarti halangan menikah karena belum mencapai batas minimal usia untuk menikah tidak final dalam arti kata lain boleh dilanggar dengan syarat harus mengajukan Dispensasi Nikah.

1. Lebih besar maslahatnya bila dikabulkan

Bila dilihat hikmah adanya Dispensasi Nikah bagi mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah, itu karena ada maslahat yang terkandung didalamnya. Seandainya tidak di bolehkan menikah karena tidak ada solusi seperti Dispensasi Nikah, maka banyaklah anak-anak dibawah batas minimal usia untuk menikah tidak bisa menikah sementara hubungan anak tersebut dengan calonnya sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah ada yang melakukan hubungan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang belum menikah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maslahat ini juga yang dilihat Majelis Hakim sehingga bila ada Permohonan Isbat Nikah Sirri sementara para pihaknya belum mencapai batas minimal usia untuk menikah Majelis Hakim mengabulkannya.

Asfawidalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa bila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan para pemohon isbat nikah karena usia untuk menikah maka banyaklah pernikahan anak-anak yang tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum sementara bila dikabulkan tidak ada yang dirugikan dan dikorbankan karena pernikahannya telah dilakukan secara Syari'at Islam dan pernikahnnya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, jadi lebih besar manfaat isbat nikah sirrinya dikabulkan dari pada ditolak.

Di wawancara yang telah penulis lakukan juga Hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat dari sisi maslahat dan mudharat dari pernikahan tersebut, terlebih lagi jika yang mengajukan permohonan isbat nikah tersebut sudah mempunyai anak, jika permohonanya ditolak maka lebih banyak mudharat yang dihasilkan karena anak tidak akan mempunyai akta dan anak akan dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak mempunyai hak apapun dari ayah kandungnya.[86]

Perlindungan terhadap anak sangatlah perlu di Indonesia, hal ini tentu mewujudkan generasi yang lebih baik kedepannya, karena melalui generasi yang baik akan menciptakan Negara Indonesia yang lebih baik kedepannya.[87]

Sebelum melihat dari sisi Undang-Undang yang dilanggar oleh Hakim, Hakim terlebih dahulu melihat apakah pernikahan yang dilakukan kedua belah

[86]*Berdasarkan Wawancara, Survei di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Terhadap Isbat Nikah Sirri, 15 Februari, 2020.*
[87] Asharuddin Salim, *Pernikahan*, Jakarta, 2003, hlm,92.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam atau tidak, jika tidak maka permohonan isbat nikah tersebut tetap tidak dapat diterima karena kunci dari permohonan isbat nikah tersebut adalah sesuaikah pernikahan tersebut dengan aturan pernikahan yang ada dalam syari'at Islam, seperti kawin lari dimana yang menjadi wali nikahnya biasanya bukanlah ayah kandungnya maka permohonan tersebut akan ditolak.[88]

Isbat nikah karena pemohon diwaktu menikah dulunya belum mencapai batas minimal usia perkawinan semua dikabulkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini dpat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Usia Para Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Ketika Menikah Sirri Tahun 2020

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentase
1	Mencapai batas minimal usia perkawinan	9	75%
2	Tidak mencapai batas minimal usia perkawinan	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hanya 25% dari 12 perkara isbat nikah yang pernikahannya tidak mencapai batas minimal usia untuk menikah dan ada 75% dari 12 perkara isbat nikah yang pernikahannya mencapai batas minimal usia untuk menikah. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa masih ada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur tetapi tidak mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, seperti yang sudah diatur dalam pasal 7 tersebut. Solusi untuk calon mempelai yang belum mencapai batas

[88] *Berdasarkan Wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri, 15 Februari 2020.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

minimal usia untuk menikah tidak final, dalam arti kata lain boleh dilanggar dengan syarat harus mengajukan Dispensasi Nikah bila mau menikah di KUA.

Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri tetapi mereka tidak ada mengajukan dahulu Dispensasi terhadap pernikahan yang dilakukannya ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim biasanya tidak lagi mempersoalkan Dispensasi Nikah tersebut, Karena para pemohon ketika mengajukan isbat nikah sudah diatas batas minimal usia menikah dan telah punya anak. Jadi Majelis Hakim hanya memeriksa permohonan isbat nikah sirrinya saja. Kalau dilakukan telah sesuai dengan syari'at Islam dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain maka dapat dikabulkan.

2. Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwasannya perkawinan itu baru dapat dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan kepercayaannya, maksudnya disini adalah bagi yang beragama Islam itu dalam pernikahannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam pernikahan, kemudian setiap perkawinan itu haruslah dicatatkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti bahwa mereka memang sudah menikah.

Jika perkawinan yang dilaksanakan itu hanya sesuai dengan syari'at Islam tanpa adanya suatu pencatatan maka perkawinan itu disebut sebagai perkawinan itu disebut sebagai perkawinan yang dilakukan secara sirri ataupun perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang rahasia. Kenapa dikatakan rahasia, itu karena Negara tidak mengetahui telah dilaksanakannya perkawinan mereka, karena mereka tidakmencatatkannya di KUA Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui seperti apakah pandangan Hakim dalam menyikapi permasalahan isbat nikah sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hakim Asfawiberpendapat:[89]

Nikah sirri yang dilakukan oleh para pihak dapat di isbatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, karena dalam prakteknya mereka yang mengajukan isbat nikah itu mempunyai berbagai alasan kenapa pernikahan mereka dulunya dilakukan secara sirri dan tidak dicatatkan di KUA sehingga mereka harus mengajukan isbat nikah tersebut.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama manapun tidak dibolehkan untuk menolak perkaranya, dan untuk pengabulan isbat nikah sirri di Pengadilan Agama sendiri itu berdasarkan dari ajaran gama Islam, dimana jika pernikahan sirri yang mereka lakukan dulu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam maka permohonan isbat nikahnya dapat diterima.[90].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa jadi suatu acuan untuk Hakim dalam memutuskanperkara tentang isbat nikah, seperti dalam pasal 7 ayat (3) poin (e) KHI sudah dijelaskan bahwa dalam pengabulan isbat nikah itu haruslah tidak bertentangan dengan Udang-Undang Perkawinan. Artinya ialah selama para pihak

[89] *Berdasarkan wawancara Survei di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Isbat Nikah Sirri pada tanggal 5 Febuari 2020*
[90] *Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 a, Terhadap Isbat Nikah Sirri,* Pada Tanggal, 15 Febuari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang melakukan nikah sirri itu tidak mempunyai halangan saat pernikahnnya dulu seperti wali yang menikahkan wali yang sah, masih terikat perkawinan dengan orang lain bagi perempuan hubungan nasab, dan lain-lain, itu isbat nikahnya dapat dikabulkan.

Mengenai halangan perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tedapat pasal 7 ayat (3) point (e) ini jika pernikahan yang dilakukan secara sirri itu tidak bertentangan dengan aturan tersebut maka dapat dikabulkan oleh Hakim. Tetapi dalam pengabulan isbat nikah sirri Hakim mengutamakan yang namanya syari'at agama Islam tentang pernikahan, selama pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Agama Islam tentang pernikahan maka isbat nikahnya dapat dikabulkan.

Masing-masing orang mempunyai alasannya yang berbeda-beda, maka disitulah dari situlah dapat dinilai apa yang melatarbelakangi nereka sehingga harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, biasanya pihak yang mengajukan isbat nikah sirri itu memiliki alasan karena tidak punya biaya untuk mengurus pernikahnnya di KUA, kemudian pihak tersebut waktu melangsungkan pernikahnnya dibawah umur, masih banyak alasan lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama tetap mengabulkan permohonan isbat nikah sirri dan memprosesnya sampai kepersidangan dan Hakim akan tetap memberikan pertimbangannya terhadap setiap isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan selama pernikahan sirri yang dilakukan para pihak sesuai dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

syarat dan rukun pernikahan maka isbat nikahnya bisa dikabulkan kemudian penulis masih memberikan pertanyaan mengenai apa saja pertimbangan dari hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat nikah sirri ini.

Hakim Asfawiberpendapat:[91]

Pada penjelasan dari Hakim Asfawiini, isbatnikah itu bisa dikabulkan selama pernikahnnya dulu telah sesuai dengan syari'at Islam.Seperti yang sudah diketahui bahwa nikah sirri termasuk kepada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, dan banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh para pihak kenapa mereka dulunya tidak mencatatkan perkawinanya, yang jelas jika pernikahannya dulu memenuhi syarat dan rukun maka Hakim harus mengabulkannya.

Mengenai pertimbangan yang diberikan oleh Hakim sendiri itu adalah tentang Maslahat dan Mudharat yang akan ditimbulkan jika isbat nikahnya dikabulkan. Hakim juga dalam mengabulkan suatu perkara haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat, sehingga dari keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim itu terdapat rasa keadilan.

Mengenai KHI yang berbeda pada pasal 7 ayat (3) poin (e) disitu dijelaskan bahwa isbat nikah dapat dikabulkan jika tidak bertentangan ataupun berhalangan dengan aturan yang ada pada Undang-Undang perkawinan, ini sebenarnya menjadi peluang bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah sirri, asalkan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam.

[91] *Berdasarkan wawancara, survei di Pengadilan Agama Pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri, pada tanggl 5 Febuari 2020*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena Nikah sirri itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan sudah pasti mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti telah adanya pernikahan, maka dalam pengajuan permohonan isbat nikah dimana pada tahap pembuktian, para pihak harus bisa menyakinkan Hakim bahwa mereka bener sudah menikah dengan menghadirkan saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut, dari sinilah pentingnya saksi dalam pernikahan.

Alasan Hakim mengabulkan isbat nikah sirri ini adalah karena Hakim memperhatiakan masa depan anak-anak yang telah dilahirkan oleh mereka yang dulunya melakukan pernikahan secara sirri, rujukan Hakim adalah untuk kemaslahatan itu. Apabila tidak diisbatkan akan memberikan dampak mudharat bagi si anak yang telah dilahirkan, jadi Hakim tidak semata-mata hanya mengabulkan isbat nikah begitu saja, tetapi Hakim juga melihat *maslahat* dan *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila Isbat Nikah tersebut dikabulkan. Saat ingin mengisbatkan nikah sirri kebanyakannya alasan pemohon adalah tidak memiliki biaya, karena alasannya adalah jika menikah di KUA biaya nya mahal.Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner yang penulis lakukan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.6

Alasan Pemohon Melakukan Nikah Sirri dan Tidak Mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Tahun 2020

No	Alternatif Jawaban	Bnayak Perkara	Presentase
1	Karena tidak ada biaya	8	67%
2	Karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan	3	25%
3	Karena tidak lengkapnya administrasi	1	8%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat tegambar 67% dari 12 perkara Isbat Nikah yang pernikahannya dilakukan secara sirri karena tidak ada biaya dan melakukan nikah sirri karena belum mencapai batas minimal usia sebanyak 25% dan melakukan nikah sirri karena tidak lengkapnya administrasi seperti tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada 8%.Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa masih ada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur teapi tidak mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, seperti yang sudah diatur dalam pasal 7 terebut. Solusi calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah tidak final. Dalam kata lain boleh dilanggardengan syarat harus mengajukan Dispensasi Nikah bila mau menikah di KUA.

Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri tetapi mereka tidak ada mengajukan dahulu dispensasi terhadap pernikahan yang dilakukannya ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim biasanya tidak lagi mempersoalkan dispensasi nikah tersebut. Karena para pemohon ketika mengajukan isbat nikah sudah diatas batas mminimal usia menikah dan telah punya anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.7
Alasan Pemohon Mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentase
1	Karena akta nikah hilang	8	67%
2	Karena tidak mencatatkan pernikahan di KUA (Sirri)	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat tergambar 67% dari 12 perkara yang mengajukan isbat nikah karena akta nikah hilang dan alasan tersebut pemohon mengajukan permohonan isbat nikah sirri di pengadilan Agama. dan ada 25% perkara isbat nikah yang pernikahannya tidak dicatatkan.

Tabel 3.8

Yang Dialami Pemohon Karena Pernikahan Sirri Tidak Dicatatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentase
1	Ada keraguan tentang keabsahannya	9	75%
2	Sering mengalami kesulitan dalam hal administrasi	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hanya 75% dari 12 perkara isbat nikah yang mengalami keraguan tentang keabsahannya dan ada 25% isbat nikah yang sering mengalami kesulitan dalam hal administrasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.9

Akibat Hukum Para Pemohon Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

NO	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Presentase
1	Iya	9	75%
2	Tidak	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 75% Pernikahan yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama dan 25% dan yang dicatakan pernikahan tersebut 25%. Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri tetapi mereka tidak ada mengajukan dahulu Dispensasi terhadap pernikahannya yang dilakukannya ke Pengadilan Agama Majelis Hakim biasanya tidak akan mempersoalkan Dispensasi Nikah tersebut karena para pemohon mengajukan isbat nikah sudah diaats batas minimal usia nikah dan telah punya anak.

Tabel 3.10

Alasan Pemohon Mengajukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2020

No	Altenatif Jawaban	Banyak Perkara	Presentase
1	Karena Akta Nikah Hilang	8	67%
2	Karena Tidak Mencatatkan Pernikahan di KUA (Sirri)	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel tersebut dapat tergambar 67% dari 12 perkara yang akta pernikahannya hilang dan melakukan permohonan isbat nikah di pengadilan Agama dan 25% Karena tidak mencatatkan pernikahan di KUA (Sirri) bagi para pemohon melakukan nikah sirri tidak ada mengajukan dahulu dispensasi terhadap pernikahan yang dilakukan ke Pengadilan Agama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.11

Yang Dialami Para Pihak Jika Tidak Mencatatkan Pernikahan Yang Dilakukan Secara Sirri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2020

NO	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Presentase
1	Ada Keraguan Tentang Keabsahannya	9	75%
2	Sering Mengalami Kesulitan Dalam Hal Administrasi	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 75% Para pihakAda Keraguan tentang keabsahannya yang tidak mencatatkan pernikahan yang dilakukan secara sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru dan 25% Para Pihak Sering mengalami kesulitan dalam hal administrasi.

Hakim Asfawi berpendapat:[92]

Dalam mengabulkan perkara isbat nikah sirri Hakim melihat kembali kepada pernikahan itu apakah pernikahannya dulu dilakukan menurut ketentuan syari'at agama Islam atau tidak karena pernikahan sirri ini juga ada yang tidak sesuai dengan syari'at dalam Islam, seperti tidak adanya wali dari pihak perempuan padahal wali itu penting, dan dalam menentukan siapa-siapa saja yang bisa dijadikan wali juga sudah diatur dalam Islam.

Maka dari itu, untuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim sendiri haruslah sesuai ketentuan yang ada ketentuan yang ada dalam Agama Islam tentang perkawinan, jika perkawinan yang merekalaksanakan dulunya itu tidak

[92] *Berdasarkan Wawancra, Survei di Pengadilan Agama Pekanbaru, Terhadap Isbat Nikah Sirri, Pada Tanggal 5 Febuari 20220*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi syarat dan ruku dalam pernikahan maka isbat nikah yang di mohonkan di Pengadilan Agama tidak akan pernah dikabulkan.

Kemudian yang menjadi landasan bagi Hakim adalah Undang-Undang pernikahan yang terletak pada pasal 2 ayat (2) dimana pernikahan itu haruslah dicatatkan, dimana bagi umat Islam itu dicatatkan di KUA.Tetapi pada kenyataanya masih banyak sekali masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, makanya permohonan isbat nikah sirri semakin meningkat di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Mengenai permohonan isbat nikah sirri yang dikabulkan itu, Hakim melihat dari kemaslahatan yang akan ditimbulkan nanti. Maksudnya adalah jika mereka menikah secara sirri yang dimana pernikahannya telah sah menurut agama Islam pastinya mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sehingga itu dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pernikahan mereka.

Dari situlah pentingnya isbat nikah itu hadir, untuk memberikan kepastian kepada mereka yang pernikahannya belum dicatatkan sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum karena telah mendapat akta nikah.Kemudian Isbat Nikah Sirri juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan di perkawinan sirri tersebut, karena anak-anak tersebut tidak sah sehingga perlu dilindungi.[93]

[93]*Berdasarkan Wawancara Survei di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 a, Terhadap Isbat Nikah Sirri,* Pada Tanggal 15 Febuari 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada dasarnya sama dengan pelaksanaan Isbat Nikah lainnya, Dapat dilihat Dalam 6 Tahap, Yaitu: Pendaftaran Perkara/Meja, Pembayaran Biaya Perkara, Panitera, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Pengambilan Produk Pengadilan.
2. Kendala Dalam Proses Permohonan dalam Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru. Di Pengharuhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari pihak yang mengajukan Nikah Sirri, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap isbat nikah sirri adalah isbat nikah sirri bisa dikabulkan selama nikah sirri tersebut dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan para pemohonnya tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

1. Diharapkan kepada Para Pihak Yang ingin mengesahkan Pernikahan Sirrinya harus melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Agar pihak Pengadilan Agama Pekanbaru Khususnya Pengadilan Agama melakukan sosialisasi terhadap keabsahan pentingnya melakukan pernikahan tercatat dan diakui oleh Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan* dan *Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: 1999.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia Akademika Presindo: Jakarta, 2007.

Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*. UIR Prees: Pekanbaru, 2008.

Alhamdani.*Risalah Nikah,* Pustaka Amani: Jakarta, 1989.

Ali. Hukum *Perdata Islam di Indonesia,* Sinar Grafika: Jakarta, 2006.

Arikunto.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta: Jakarta, 2014.

Basyir.*Hukum Perkawinan Islam,* FH-UII: Yogyakarta, 2000.

Dahlan.*Ensiklopedia Hukum Islam*: Ichtiar Baru Van Hooeve: Jakarta, 2000.

Daly. *Hukum Perkawinan Islam,* Bulan Bintang: Jakarta, 1988.

Djubaidah.*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

Efendi.*Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Bandung, 2012.

Happy.*Nikah Sirri Apa Untungnya*, Transmedia Pustaka, 2007.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ibrahim.*Pengantar Hukum Islam* di Indonesia, Garda, Jakarta, 1965.

Irfan.*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam,* Amzah, Jakarta, 2013.

Kansil.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1986.

Kharlie.*Hukum Keluarga Indonesia,* Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Marjono.*Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan*. Mirzan: Bandung, 1997.

Mualy.*Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*, Surabaya, 2010.

Mukhtar.*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Nur.*Fiqih Munakahat*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993.

Rahman.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo: Jakarta, 1992.

Rofiq.*Hukum Islam di Indonesia,* Raja Grafindo Persada. 2000.

Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UII-Prees, Jakarta, 1986.

Zein.*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Kencana: Jakarta, 2010.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 0262/Pdt.P/2020/PA.Mna dan Putusan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pal Tentang Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah terhadap pernikahan Sirri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Jurnal

Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh, Dian Syafrianto, membahas prosedur Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarangsetelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dian Syafrianto, 2013.

Legislasi Hukum Pernikahan Sirri dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Oleh, Mukhtaruddin Bahrum, Yaitu berfokus kepada bagaimana pernikahan sirri dapat dilegalkan melalui Isbat Nikah setelah perkawinan tersebut dilangsungkan agar mendapat kepastian hukum dan setelah Undang-undang perkawinan disahkan karna adanya Kepentingan-kepentingan Dallam berumah tangga, Mukhtaruddin Bahrum, 2013.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Kamus

Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawir kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 2002.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka, Jakarta, 1995.

F. Internet

http://www.nurhadi.com//Islam/Pernikahan/Nikah-Sirri-dalam-islam/amp, (Diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 13:20 WIB.

http://www. Sudut Hukum.com.// Pengertian-Isbat-Nikah-html,(Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 20:40 WIB.

http://zhalabe.Blogspot.co.id.//Pengertian-Nikah Sirri,html#. 24 Oktober 2020 Pukul 02:06 WIBs

WrOyTOyTMw (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 02:06 WIB.

http.//www.daly.com.//Nikah-Terhadap-Status-Perkawinan-html, (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 00:12 WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :